

Prosiding

Lokakarya

“Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0”



Pusat Kajian dan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur I LAN

2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan berkah-Nya maka kegiatan Lokakarya "Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" telah berhasil dilaksanakan pada Hari Rabu, 31 Oktober 2018 di Gedung Serba Guna PKP2A I Lembaga Administrasi Negara. Tujuan dari pelaksanaan lokakarya ini adalah untuk membahas kondisi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan tantangannya dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 serta mengakomodasi kebutuhan Kabupaten/ Kota di lingkungan Jawa Barat.

Meskipun kegiatan sudah selesai dilaksanakan, laporan pertanggungjawaban sudah diselesaikan –berikut data dukung administrasinya–, tetapi ada satu hal lagi yang perlu dibuat, Prosiding Lokakarya. Penyusunan prosiding ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral penyelenggara yang semoga hasilnya bisa menjadi poin pembelajaran bagi siapapun yang ingin memahami reformasi birokrasi yang dikaitkan dengan fenomena revolusi industri, sesuai tema lokakarya ini.

Prosiding ini berisi semua materi yang disampaikan dalam lokakarya, baik dalam bentuk ceramah oral maupun artikel tertulis. Secara filosofis, prosiding ini berisi mutiara pemikiran yang dipersembahkan para penyusunnya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya administrasi negara. Terlepas dari validitas dari konsep-konsep yang disampaikan, akan tetapi substansi prosiding ini menjadi satu perspektif untuk melihat pelaksanaan reformasi birokrasi di tanah Pasundan, Jawa Barat.

Penyusun prosiding berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dihasilkannya buku ini. Tak lupa permohonan maaf atas semua kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kerja dan keikhlasan yang telah dipersembahkan untuk-Nya serta umat-Nya.

Sumedang, Desember 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan	5
Pembukaan Acara.....	6
A. Laporan Penyelenggaraan	6
B. Pidato Pembukaan	8
C. Pidato Kunci (Keynote Speech) "Redefinisi Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0"	9
Diskusi Pleno	15
A. Strategi Pengembangan Aparatur Jawa Barat dalam Era Revolusi Industri 4.0 ...	15
B. Reformasi Birokrasi Jawa Barat: Urgensi, Tantangan, dan Strategi	20
C. Peluang Ekonomi Digital di Jawa Barat dan Peran Pemerintah Daerah	21
D. Dukungan Telkom dalam Era Revolusi Industri 4.0 pada Kemitraan Pemerintah Daerah menuju Ekonomi Berbasis Digital	22
Artikel dan Data Kuesioner.....	27
A. Artikel 1: Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 27	
B. Artikel 2: Menyuntikkan Virus Kolaborasi dalam Mereformasi Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0	28
C. Artikel 3: Revolusi Industri 4.0 : Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Reformasi Birokrasi	30
D. Artikel 4: Inovasi dan Reformasi Birokrasi: Kunci Menghadapi Era Revolusi Industri 4. 0	31
E. Data Hasil Kuesioner	33
Penutup.....	36
Lampiran	38
A. Rekapitulasi Tanya Jawab Peserta	38
B. Rekapitulasi Pertanyaan Melalui sli.do	39
C. Curriculum Vitae Narasumber	39

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sudahkah Indonesia mampu mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia? Pertanyaan ini merupakan refleksi terhadap visi Reformasi Birokrasi yang dicanangkan dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menitikberatkan pada upaya pembangunan profesionalisme aparatur negara, pembangunan bidang hukum, dan perbaikan tata kelola pemerintahan, baik untuk tingkat pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kenyataannya sampai dengan tahun 2017, dari hasil penilaian terhadap pelaksanaan RB pada delapan area perubahan, baik di tingkat instansi pemerintah pusat maupun daerah, hasilnya belum optimal. Hasil Evaluasi untuk 82 Kementerian dan Lembaga, baru dua yang mendapatkan predikat A, sedangkan 80 lainnya bervariasi perolehannya¹. Kondisi di tingkat daerah jauh lebih memprihatinkan, dari 34 provinsi, baru dua yang meraih prestasi terbaik, itupun dengan capaian nilai BB².

Sementara itu, ditinjau dari hasil penelitian, beberapa kajian menunjukkan variasi hasil implementasi RB. Pada tahap pertama RB –yang menekankan pada penguatan birokrasi pemerintah³— ditemukan bahwa RB terjebak dalam formalitas dan aspek administratif dikarenakan motivasi yang menyimpang, dari pelayanan publik menjadi remunerasi (Riyadi, dkk., 2014)⁴. Perubahan mulai terlihat pada tahap kedua yang menitikberatkan pada 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas⁵. Hal tersebut salah satunya nampak pada pelaksanaan RB di Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ria (2016) menemukan bahwa RB di Pemda Provinsi Jawa Barat terlihat sudah berjalan dengan baik, bahkan memberikan pengaruh nyata bagi perbaikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat⁶. Hasil temuan tersebut senada dengan hasil kajian yang dilakukan oleh PKP2A I LAN (2017) pada lokus yang sama yang menilai bahwa capaian RB Provinsi Jawa Barat dilihat dari 8 plus 1 dimensi/komponen pengungkit sudah cukup baik, tetapi direkomendasikan untuk melakukan 1) penguatan manajemen perubahan; 2) peningkatan kolaborasi dengan stakeholder lain untuk mempertahankan prestasi pada dimensi akuntabilitas; 3) penilaian kembali pengelolaan SDM; 4) pengevaluasian aspek kelembagaan; dan 5) penguatan manajemen pelayanan publik⁷. Berdasarkan informasi dapat disimpulkan sementara bahwa pelaksanaan RB di Pemda Provinsi Jawa Barat sudah berjalan on the right track, akan tetapi apakah tren positif ini akan berlanjut ke depan?

¹ Pratama, F. (2017, 24 Juli). Ini Hasil Evaluasi Kementerian-Lembaga, Siapa Dapat Rapor Merah? *detikNews*. Diunduh dari <https://news.detik.com/>

² Yunus, Y. (2017, 21 Juli). Reformasi Birokrasi di 34 Provinsi Dievaluasi, Ini Hasilnya. *Kabar24*. Diunduh dari <http://kabar24.bisnis.com/>

³ Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

⁴ Riyadi, Wulandari, P., Prayitno, B., Pratiwi, & Afif, M. (2014). *Strategi Reformasi Birokrasi di Daerah*. Sumedang: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara.

⁵ Peraturan Menteri PAN dan RB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

⁶ Ria, Mai Damai. (2016). *Analisis Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

⁷ PKP2A I LAN. (2017). *Survei Kapasitas Internal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Membedah Kapasitas Organisasi dalam Mendukung Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)*. Sumedang: PKP2A I LAN.

Tantangan baru yang sangat besar menanti bangsa Indonesia di masa yang akan datang melalui Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0). Era RI 4.0 merupakan perkembangan baru dunia usaha yang dicirikan dengan otomasi dan pertukaran data digital dalam industri manufaktur⁸. Kendati inisiasi awal RI 4.0 dilakukan pada bidang manufaktur, namun prinsip-prinsipnya yang menggantikan peran manusia sebagai operator –dengan komputer dan mesin— tentunya akan mempengaruhi pola interaksi antar manusia. Akibatnya, penerapannya otomatis akan meluas ke bidang-bidang lainnya, tidak terkecuali birokrasi. Sebenarnya, modalitas yang menjadi faktor pendukung RB di era RI 4.0 cukup banyak, antara lain kualitas ASN yang semakin baik melalui perbaikan tingkat pendidikan, kemudian praktik demokrasi yang sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Faktor lingkungan eksternal seperti bonus demografi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, penurunan angka kemiskinan, dan persatuan bangsa turut mendukung RB yang antisipatif terhadap RI 4.0 ini. Meskipun begitu, beberapa fenomena pelemah juga harus diperhitungkan sebagai tantangan, seperti sisa-sisa dampak krisis moneter 1998, pelemahan rupiah akibat konflik dagang AS dengan Tiongkok, dan situasi politik jelang Pemilu 2019 yang memicu polarisasi masyarakat.

Berbagai konsep bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB yang antisipatif terhadap RI 4.0, seperti konsep collaborative governance, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi (TI). Konsep collaborative governance menjadi relevan mengingat bahwa RB tidak boleh lagi hanya mengandalkan internal instansi pemerintah, tetapi perlu juga melibatkan pilar pemerintahan lainnya, yakni masyarakat, sektor swasta, dan perguruan tinggi. Implementasi secara internal dilakukan dengan menembus sekat antar K/L di lingkup pemerintah pusat dan sekat antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintah Daerah, sehingga kerja sama dalam melaksanakan visi pemerintahan tercapai secara terintegratif. Secara eksternal, dapat dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintah (pusat &/ daerah), dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam berbagai keputusan yang mempengaruhi semua pihak, seperti yang dilakukan oleh Pemda Kota Bandung⁹ maupun daerah-daerah lainnya. Kemudian konsep inovasi daerah yang berfungsi agar formalisasi RB diubah menjadi fokus terhadap penyelesaian permasalahan spesifik di lingkungan K/L/D dengan cara yang unik dan spesifik pula¹⁰. Internalisasi mindset inovasi pada individu ASN, seperti pada diklat kepemimpinan pola baru yang digagas Lembaga Administrasi Negara akan melatih mereka menjadi pemimpin-pemimpin transformatif dalam menghadapi RI 4.0 yang terjadi saat ini. Selanjutnya pemanfaatan TI secara lebih luas, di luar pelayanan publik dan tata laksana pemerintah, terutama yang terkait dengan sektor riil pendukung ekonomi. Penggunaan TI tidak sekedar menjadi asesori RB, tetapi benar-benar menjadi key leverage yang berorientasi pada pelayanan. Ketiganya masih bisa diperkaya dengan berbagai konsep lainnya, seperti pengembangan kompetensi SDM dan TQM, yang filosofinya adalah mengaplikasikan konsep teknis ke dalam kerangka pelaksanaan RB.

Ketika implementasi RB ditarik pada konteks sempit di Provinsi Jawa Barat, maka ada beberapa karakter unik yang perlu diperhatikan. Provinsi Jawa Barat sebagai sebuah daerah, merupakan wilayah dengan penduduk yang sangat heterogen, memiliki banyak kawasan bisnis dan industri yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, serta tingkat perekonomian yang bervariasi. Ditambah lagi dengan hadirnya gubernur baru di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, diharapkan akan menciptakan momentum perubahan yang akan diikuti oleh ASN di tubuh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maupun Kabupaten/ Kota lainnya di Jawa Barat. Meskipun Gubernur Jawa Barat sudah memasukkan RB ke dalam visi pemerintahannya, Jabar Juara Lahir Batin, akan tetapi diperlukan sinergi dengan semua pihak untuk mewujudkannya.

Berbagai permasalahan, perkembangan, dan ide konstruktif yang telah dideskripsikan sebelumnya perlu didiskusikan bersama dalam rangka menyesuaikannya dengan konteks RB

⁸ wikipedia

⁹ Tasrin, K., Pratiwi, & Ella, S. (2016). Model Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan Inovasi Administrasi Negara. Sumedang: PKP2A LAN.

¹⁰ Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Kontekstual. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Jawa Barat. Selanjutnya dari diskusi ini bisa ditarik kesepakatan dan disusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas RB, bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Untuk itu Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) Lembaga Administrasi Negara (LAN) bermaksud menyelenggarakan Lokakarya dengan Tema "Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0".

B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Lokakarya "Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" bertujuan untuk mendiseminasi gagasan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dan memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan serta pengembangan RB di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sasaran dari kegiatan lokakarya ini, yaitu:

1. Terkumpulkannya ide dan gagasan peningkatan kualitas RB dari narasumber dan peserta lokakarya; dan
2. Tersusunnya rekomendasi RB bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat;

Pembukaan Acara

Pada pembukaan acara ini disampaikan informasi dasar mengenai kegiatan Lokakarya "Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" melalui laporan penyelenggaraan dan pidato pembukaan. Selanjutnya konsep pembuka disampaikan dalam pidato kunci. Melalui informasi yang disampaikan dalam rangkaian pembukaan acara ini diharapkan peserta lokakarya mendapatkan gambaran mengenai arah pembahasan dalam bagian berikutnya, diskusi panel.

A. Laporan Penyelenggaraan

Disampaikan oleh **Hari Nugraha, SE., M.PM.**

Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara.

Yang terhormat:

- Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Dr. Adi Suryanto, M.Si.
- Gubernur Provinsi Jawa Barat, H. Mochama Ridwan Kamil, ST., MUD.
- Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufik, DEA.
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Iwa Karniwa, SE., Ak., MM., CA., PIA.
- Ketua KADIN Provinsi Jawa Barat, Agung Suryamal Sutisno
- Vice President Media & Digital Business PT. TELKOM, Tbk., Wiseto Prasetyo Agung.
- Para peserta Lokakarya, undangan serta hadirin yang berbahagia

Bismillahirrohmaanirrohim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Mengawali laporan penyelenggaraan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karean atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal afiat guna mengikuti Lokakarya Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara Jatinangor.

Pada suasana yang berbahagia ini pula, izinkan kami melaporkan penyelenggaraan Lokakarya ini sebagai berikut:

1. Tema Lokakarya

Tema dari Lokakarya ini adalah "Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0". Lokakarya ini dipandang penting untuk memberikan saran dan gagasan dalam rangka peningkatan kualitas RB bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat khususnya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

2. Tujuan dan Sasaran Lokakarya

Lokakarya "Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" bertujuan untuk mendiseminasi gagasan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dan memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan serta pengembangan RB di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Adapun sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan lokakarya ini, yaitu:

- ❖ Terkumpulnya ide dan gagasan peningkatan kualitas RB dari narasumber dan peserta lokakarya; dan
- ❖ Tersusunnya rekomendasi RB bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

3. Nara Sumber Lokakarya

Lokakarya ini dilaksanakan selama satu hari. Adapun narasumber yang hadir dalam lokakarya ini yakni:

- ❖ Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si., yang akan menyampaikan *keynote speech* yang berjudul **Redefinisi Reformasi Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0**.
- ❖ Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufik, DEA., yang akan menyampaikan **Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Strategi Pengembangan Kompetensi ASN Daerah Berbasis Revolusi Industri 4.0**.
- ❖ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Iwa Karniwa, SE., Ak., MM., CA., PIA., yang akan menyampaikan **Reformasi Birokrasi Jawa Barat: Urgensi, Tantangan, dan Strategi**.
- ❖ Ketua KADIN Provinsi Jawa Barat, Agung Suryamal Sutisno, yang akan menyampaikan **Peluang Ekonomi Digital di Jawa Barat dan Peran Pemerintah Daerah**.
- ❖ Vice President Media & Digital Business PT. TELKOM, Tbk., Wiseto Prasetyo Agung., yang akan menyampaikan **Kemitraan Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Digital Jawa Barat**.

4. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Lokakarya Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 ini diselenggarakan di Gedung Serba Guna Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara yang bertempat di Jl. Kiara Payung, Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

5. Peserta Lokakarya

Peserta Lokakarya ini berasal dari berbagai daerah. Adapun peserta terdiri dari:

- ❖ Pengelola RB di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- ❖ Pengelola RB di Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di lingkup Jawa Barat (yg hadir 23 Kab/Kota dari 27 daerah); dan
- ❖ ASN Kementerian, Pemda, Perguruan Tinggi serta Akademisi pemerhati isu RB.

yang seluruhnya berjumlah 112 orang

Kepala LAN dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah laporan penyelenggaraan ini kami sampaikan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mohon perkenan Kepala LAN untuk menyampaikan *keynote speech* dan membuka secara resmi acara Lokakarya ini.

Wabillahittaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

B. Pidato Pembukaan

Disampaikan oleh **Dr. Adi Suryanto, M.Si.**
Kepala Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Yang saya hormati, Para Narasumber Lokakarya;

Yang saya hormati, Tamu Undangan;

Yang saya hormati, Para hadirin sekalian;

Saudara-saudara sekalian, Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Lokakarya dengan tema "Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara.

Reformasi Birokrasi.

Istilah ini sudah didengungkan sejak tahun 2010 dengan keluarnya berbagai kebijakan yang mengatur tentangnya. Berbagai kajian juga telah dilakukan untuk memastikan bahwa reformasi atau perubahan yang diinginkan berada pada jalur yang tepat.

Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa pelaksanaan RB di Indonesia sudah berjalan *on the right track*. Pada tahap awal, RB memberikan titik tekan pada penguatan birokrasi pemerintah. Peningkatan semakin terlihat pada tahap berikutnya yang menitikberatkan pada 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Meski begitu, RB mendapati banyak tantangan di tengah implementasinya. Misalnya dengan hasrat untuk mengejar remunerasi belaka, yang ditengarai menjadi motivasi utama adopsi RB. Tapi Alhamdulillah, tantangan ini berhasil dilewati. Saat ini berbagai instansi pemerintah berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.

Tantangan berikutnya muncul dalam bentuk tindak korupsi oleh sejumlah oknum pejabat pemerintah yang menodai kepercayaan masyarakat. Padahal dengan kinerja pemerintah secara umum dan stigma positif terhadap profesi ASN, telah memperbaiki citra birokrasi. Tapi, lagi-lagi, Alhamdulillah. Tuhan memberikan karunia berupa pemimpin-pemimpin muda yang brilian dan menciptakan terobosan dalam bentuk inovasi untuk daerah yang dipimpinnya. Salah satunya yang berada di tengah kita, Kang Emil.

Para hadirin yang berbahagia,

Mungkin sebagian dari para hadirin bertanya-tanya, "Mengapa lokakarya kali ini hanya berfokus ke Jawa Barat?".

Jawabnya adalah karena Jawa Barat saat ini semakin memperkuat *image* sebagai salah satu barometer kemajuan Indonesia. Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, seakan identik dengan inovasi pemerintahan.

Hasil penelitian atas pelaksanaan RB di Jawa Barat, menunjukkan hal yang positif. Penelitian dari IPB menemukan bahwa RB di Pemda Provinsi Jawa Barat terlihat sudah berjalan dengan baik, bahkan memberikan pengaruh nyata bagi perbaikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil temuan tersebut senada dengan hasil kajian yang dilakukan oleh PKP2A LAN pada tahun 2017 yang menilai bahwa capaian RB Provinsi Jawa Barat dilihat dari 8 plus 1 dimensi menunjukkan capaian yang baik, terutama untuk aspek penataan peraturan perundang-undangan dan akuntabilitas pemerintah.

Para hadirin yang berbahagia,

Saat ini RB ditantang untuk membuat perubahan sampai sudut wilayah yang terpencil. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu memberikan layanan yang sama baiknya antara di pusat kota dengan pelosok desa atau kelurahan.

Para hadirin yang ada di sinilah nantinya yang diharapkan akan menginisiasi perubahan di Kabupaten atau Kotanya masing-masing agar RB dapat diwujudkan dengan efektif.

Para hadirin yang berbahagia,

Saya ajak saudara-saudara sekalian untuk bergandengan tangan dan berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan Jawa Barat yang maju dan lebih jauh lagi BIROKRASI KELAS DUNIA untuk seluruh Pemerintah Daerah di Bumi Pertiwi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahiim, saya nyatakan Lokakarya ini resmi dibuka.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

C. Pidato Kunci (Keynote Speech) "Redefinisi Reformasi Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0"

Disampaikan oleh **Dr. Adi Suryanto, M.Si.**

Kepala Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia

Yth. Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili,

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat,

Yth. Ketua KADIN Jawa Barat,

Yth. Direktur Utama PT. Telkom Indonesia,

Yth. Saudara Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Jawa Barat

Serta para praktisi, akademisi, LSM, ASN dan hadirin sekalian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat dalam rangka menghadiri Lokakarya "Reformasi Birokrasi di Jawa Barat Dalam Era Revolusi Industri 4.0".

Lokakarya ini sebagaimana dilaporkan dihadiri oleh para praktisi, akademisi, ASN, LSM, pengambil kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah untuk bertukar pikiran tentang strategi reformasi birokrasi dalam rangka mengoptimalkan *opportunity* yang ditawarkan oleh perubahan tantangan jaman. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita tengah dihadapkan pada tantangan baru yang akan datang melalui Revolusi Industri (RI) 4.0. Era RI 4.0 merupakan perkembangan baru dunia usaha yang dicirikan dengan otomasi dan pertukaran data digital dalam industri manufaktur. Kendati inisiasi awal RI 4.0 dilakukan pada bidang manufaktur, namun prinsip-prinsipnya yang menggantikan peran manusia sebagai operator –dengan komputer dan mesin— tentunya akan mempengaruhi pola interaksi antar manusia. Akibatnya, penerapannya otomatis akan meluas ke bidang-bidang lainnya, tidak terkecuali sektor publik dan birokrasi.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Revolusi Industri 4.0 memang berdampak pada banyak sektor, terutama sektor *private*, namun demikian tidak dapat dinafikan bahwa sektor publik atau pemerintahan merupakan salah satu unsur penting bagi Indonesia untuk dapat menerima *benefits* atau kemanfaatan dari berbagai peluang yang ditawarkan oleh Revolusi Industri 4.0. Tanpa kehadiran pemerintahan yang baik, maka akan tidak mudah bagi berbagai sektor pembangunan untuk dapat mengoptimalkan diri dalam menyongsong RI 4.0. Karena itulah, kita harus selalu melakukan upaya perbaikan birokrasi melalui Reformasi Birokrasi.

Berbagai perubahan (*breakthrough*) di sektor publik sangat diperlukan dalam rangka mengejawantahkan berbagai peluang dan kesempatan yang ditawarkan oleh Revolusi Industri 4.0. Untuk itu Reformasi Birokrasi sangat diperlukan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas birokrasi agar memiliki kompetensi baik berupa pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) serta perilaku (*attitude*) yang dipersyaratkan untuk mampu menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Tanpa kehadiran pemerintahan yang berintegritas dan kompeten, kita tidak mungkin dapat menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Karena itu, konsep Reformasi Birokrasi harus di-*redesign* sedemikian rupa guna mengartikulasikan perubahan perspektif dari tuntutan Revolusi Industri 4.0. Sebagai konsekuensinya adalah bagaimana kita mengharapkan pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung serta membekali SDM Aparaturnya dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Urgensi untuk membenahi birokrasi ini juga dipicu oleh perkembangan posisi Indonesia berdasarkan *global megatrend*. Diprediksi akan terjadi *Global Economic Shifting* dari Barat ke Timur dimana negara-negara Asia Tenggara akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru (*emerging economies*) di dunia menggantikan negara-negara barat. Negara-negara ASEAN akan tumbuh menjadi satu diantara enam kekuatan ekonomi baru selain China, India, EU, Amerika dan Jepang. Kaitannya dengan *Purchasing Power Parity* (PPP), negara-negara ASEAN adalah yang terbesar keempat dunia pada tahun 2015-2016 setelah China, USA, dan India. Pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun 2016 mencapai 4.7%, dua

kali lipat dari prosentase pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya sebesar 2.3%. Untuk itu, pemerintah negara-negara ASEAN perlu melakukan upaya-upaya kolektif (*collective efforts*) dalam rangka menyelesaikan bebagai persoalan kebijakan yang kompleks di lingkup ASEAN maupun dalam rangka mempersiapkan diri menjawab setiap tantangan dan peluang.

Saudara-saudara yang saya banggakan,

Reformasi Birokrasi di Indonesia sudah dimulai sejak 2010 yang hingga kini terus kita lakukan dengan berbagai langkah dan upaya inovatif. Secara umum, target besar atau visi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan "*World Class Bureaucracy*" yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang efektif dan efisien serta pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Setelah digulirkan sejak 8 tahun lalu, mari kita cermati kembali bagaimana kinerja kebijakan Reformasi Birokrasi. Sejauh mana tujuan dan visi besar Reformasi Birokrasi sudah tercapai?

Dilihat dari *Corruption Perception Index*, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2017 masih berada pada peringkat 96 dari 180 negara. Sebuah posisi yang masih jauh tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kita lihat saja, Singapura yang berada di peringkat 6 menjadi negara paling tidak korup di seluruh Asia. Lalu kita masih kalah dari Singapura (6), Brunei (32), Malaysia (62), bahkan dari Timor Leste (91), negara yang baru berusia 16 tahun.

Sementara itu, dilihat dari *Ease of Doing Business Index*, kemudahan berbisnis di Indonesia pada tahun 2017 masih menempati rangking 72, jauh di bawah negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Singapura berada pada urutan ke-2, Malaysia menempati posisi 24, bahkan kita masih tertinggal di banding Vietnam yang bertengger di posisi 68.

Selanjutnya, dilihat dari *National Competitiveness Index*, berdasarkan *Global Competitive Index* tahun 2017, indeks daya saing kita menempati ranking 36, lagi-lagi masih dibawah Malaysia (23) dan Thailand (32).

Dari segi *Government Effectiveness*, Indeks Efektifitas Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 berada pada posisi 86 dari 193 negara, lagi-lagi di bawah Singapura (1), Brunei (35), Malaysia (45), dan Thailand (62).

Dengan mempertimbangkan berbagai posisi ini, kedepan kita butuh upaya lebih serius untuk merespon berbagai tantangan yang merupakan implikasi dari bergulirnya Revolusi Industri 4.0. Hal ini karena secara umum, indeks persepsi korupsi, indeks kemudahan berbisnis, indeks daya saing, dan indeks efektifitas pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan Birokrasi. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan perbaikan pada aspek-aspek tersebut. Sehingga saat ini sepertinya kita harus sepakat bahwa ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama.

Para hadirin yang berbahagia,

Implementasi Reformasi Birokrasi menuntut beberapa perubahan perspektif. ***Perubahan perspektif pertama*** adalah perlunya pemanfaatan teknologi informasi secara tepat dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Sangat mudah untuk kita larut dalam euforia pemanfaatan teknologi informasi. Satu prinsip yang harus dipegang erat adalah ASN harus mampu memimpin perubahan. Memimpin perubahan berarti kita memegang kendali atas perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Teknologi informasi pun akan menjadi alat bagi kita, bukan berperan sebagai tujuan utama. Kepemimpinan atas perubahan akan semakin tajam dan terarah bila dilengkapi dengan inovasi baru yang bermanfaat dan kompatibel dengan sistem.

Perubahan perspektif kedua adalah inovasi sebagai "ruh" atau jiwa dari Reformasi Birokrasi. Berbagai bentuk inovasi di instansi pemerintah sedang digelorakan untuk menciptakan terobosan baru dalam dunia birokrasi. Selain melalui kebijakan inovasi daerah, masih ada kebijakan inovasi pelayanan publik, dan inovasi desa. Semuanya disinergikan untuk mewujudkan perubahan di dunia birokrasi, antara lain dalam pembentukan mindset ASN agar menjadi insan yang dinamis dan peka terhadap kebutuhan lingkungan, khususnya pihak yang dilayani. Kemanfaatan inovasi juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kemudahan dalam menikmati layanan publik, dan lebih jauh lagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, **perubahan perspektif ketiga** adalah bahwa Reformasi Birokrasi adalah kerja besar. Diperlukan campur tangan dan peran aktif setiap orang untuk mewujudkan dan menciptakan *world class bureaucracy*. Bukan hanya ASN saja yang harus berperan aktif, tapi juga elemen masyarakat lainnya, yakni dunia usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Karena masing-masing elemen memiliki kelebihan yang akan menutup kekurangan elemen lainnya. Birokrasi memiliki banyak keterbatasan, antara lain soal anggaran dan kualitas SDM. Keterbatasan ini sulit untuk dipecahkan sendiri. Tapi dibalik itu ada juga kelebihannya, antara lain akses terhadap pembuatan kebijakan publik. Sementara akademisi memiliki keunggulan dalam kualitas SDM yang menguasai konsep dan memaknai praktik di dunia nyata melalui berbagai penelitian yang telah dilakukan. Dunia usaha juga bisa berkontribusi melalui pengalaman praktis dan anggaran yang dimilikinya. Sedangkan masyarakat umum memiliki kekuatan besar dalam memberikan kritik dan memberikan dukungan bagi berbagai kebijakan publik yang dibuat oleh birokrasi.

Sinergi antara birokrat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat umum terjalin kuat dengan kesamaan visi untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Sinergi ini diwujudkan dalam konsep *collaborative governance*. Collaborative governance intinya adalah menjalankan pemerintahan dengan melibatkan stakeholder dari eksternal instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, dengan didasari semangat konsensus dan deliberatif, dibingkai oleh perjanjian formal.¹¹

Wujudnya antara lain adalah yang ditunjukkan oleh Kang Emil saat memimpin Kota Bandung dengan menciptakan program Mini Lab Food Security. Program ini merupakan wujud keinginan bersama untuk menjamin keamanan bahan pangan bagi masyarakat. Semangat untuk melindungi konsumen ini diusung oleh tiga kelompok besar, yaitu: Dinas Pangan dan Pertanian; Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Bandung; dan pemilik pasar modern. Kebijakan yang dibingkai dalam Peraturan Walikota No. 1151 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pangan pada Mini Lab Food Security di Pasar Modern dan Pasar Tradisional telah berhasil melibatkan sejumlah supermarket besar dan 33 pasar tradisional sejak 2016.¹²

Para hadirin sekalian,

Tantangan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi tidaklah sedikit. Kalau kita lihat dari contoh di atas, sebenarnya masih ada permasalahan yang perlu dipecahkan. Berbagai aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) banyak yang masih berorientasi pada operator. Aplikasi semacam ini memudahkan penciptanya tapi tidak menawarkan nilai tambah bagi masyarakat, atau bahkan lebih parah lagi, merepotkan stakeholder lain. Selain itu juga masih sering kita dengan duplikasi fungsi aplikasi dan tidak *nyambung* antara aplikasi satu dengan lainnya.

Terkait dengan *inovasi*, tidak sedikit inovasi yang bersinar dan terkenal, tapi tenggelam begitu ditinggalkan oleh inovator atau pengagasnya. Ini menjadi bahan renungan untuk kita semua. Inovasi harus dilembagakan sehingga *sustainability* tercipta.

¹¹ Ansell dan Gash, 2017

¹² Dikutip dari artikel "Menyuntikkan Virus Kolaborasi dalam Mereformasi Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0" oleh S. Amalia; A. Wahyuadianto, dan Utari.

Terakhir adalah masalah pada implementasi *collaborative governance*. Konsep ini terdengar mudah, tapi masih sulit diwujudkan bila pikiran kita masih terkotak-kotak oleh *silo mentality*. Bukan hanya antar instansi pemerintah, fenomena silo mentality sering pula muncul antar OPD dalam satu daerah. Lebih parah lagi, muncul pula antar unit kerja dalam satker yang sama. Jadi sebagai pemimpin perubahan, sebagai penggerak Reformasi Birokrasi di daerah, harus mampu meruntuhkan ego sektoral di internal pemerintah sebelum melangkah keluar dan menjalin kerja sama dengan stakeholder eksternal lainnya.

Saudara-Saudara yang saya cintai,

Dalam rangka mendorong perubahan di sektor birokrasi, perbaikan kebijakan dan meningkatkan kapasitas pemerintahan, LAN telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

Pertama, Leadership Training Reform. LAN telah berperan menjadi penggerak utama dalam pengembangan teori, konsep dan praktik Administrasi publik di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1957. NIPA juga merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan di bidang Administrasi Publik dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk Aparatur Negara. Sejak tahun 2013, LAN sudah banyak menyelenggarakan program-program pelatihan kepemimpinan yang bertujuan untuk membentuk pemimpin-pemimpin perubahan. LAN juga mengkonsep dan menyelenggarakan *Reform Leader Academy* (RLA) program pelatihan kepemimpinan yang bertujuan untuk mempercepat reformasi birokrasi dengan menyelesaikan masalah kebijakan lintas sektoral. Peserta menghasilkan kertas kebijakan dan mengubah proyek secara kolektif.

Kedua, Innovation Laboratory. Selama kurun waktu 2015-2018, LAN sudah membantu memfasilitasi penyelenggaraan laboratorium inovasi di 61 kabupaten/kota di Indonesia dan sudah menghasilkan 6593 ide/gagasan inovasi yang diterapkan di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Selain melalui program pelatihan kepemimpinan, NIPA juga mendorong inovasi sektor publik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan laboratorium inovasi dan *champion innovations*.

Ketiga, Quality of Policy. Policy Quality Index (PQI) adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melaksanakan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. Tujuan PQI adalah untuk mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pada tahun 2017, PQI telah melibatkan 12 K/L dan 3 Pemda sementara pada tahun 2018, telah melibatkan 22 K/L dan 80 Pemda. Selain itu, Sejak tahun 2017, LAN juga sudah menginisiasi Lingkaran Studi Kebijakan atau *Policy Study Circle* (PSC) yang merupakan jaringan antara pusat studi kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Pada dasarnya, PSC bertujuan untuk berbagi pengetahuan yang mendukung pembuatan *evidence based policy* (kebijakan berdasarkan bukti). Selain itu, jaringan ini juga merupakan sarana koordinasi dan pengembangan kapasitas manajemen dari berbagai pusat studi kebijakan

Para hadirin semuanya,

Revolusi Industri 4.0 seharusnya menjadi momentum bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, lalu energi tersebut disalurkan dalam bentuk kerja bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkelas dunia. Jangan sampai Revolusi Industri 4.0 ini malah menghambat kerja kita dengan menjadikan teknologi informasi sebagai asesori pemanis atau lebih parah lagi sebagai budak teknologi sehingga waktu produktif dihabiskan untuk hal yang tidak berguna.

Bila pada Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua Bali, Bapak Presiden Joko Widodo menyenggung tentang *Game of Throne* sebagai analogi kondisi ekonomi dunia, maka saya lihat hal yang sama terjadi di negeri kita. Kadang kita berlomba untuk menjadi yang terbaik. Kadang kita saling injak, saling sikut untuk meraih karir tertinggi. Tapi kita lupa, bahwa menjadi baik seorang diri tidak ada gunanya bila orang di sekitar kita sengsara. Menjadi daerah berprestasi di tengah keterpurukan daerah lain hanya berujung pada selebrasi sesaat.

*Hidup adalah Udunan.*¹³ Di dalam filosofi ini ada semangat berkolaborasi. Bersama bahu-membahu untuk meraih prestasi. Bersama berbagi kebaikan dan saling memperbaiki kelemahan. Bersama untuk maju. Bekerja sama untuk bangsa Indonesia yang berprestasi.

Adalah benar bahwa kita hadir bersama di sini, untuk membicarakan kondisi reformasi birokrasi kita. Untuk mengkaji sejauh mana kesiapan Birokrasi kita untuk bekerja dalam era Revolusi Industri 4.0. Untuk menyusun strategi bersama menghadapi era baru ini. Bersama-sama bekerja untuk mewujudkan *WORLD CLASS BUREAUCRACY*.

Wassalamualaikum Wr. Wb

¹³ Kutipan dari Ridwan Kamil

Diskusi Pleno

Sesi Diskusi Pleno merupakan acara inti dalam Lokakarya "Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0". Pada bagian ini seluruh narasumber menyampaikan ide dan pemikirannya melalui diskusi yang dipandu oleh moderator. Sesi diskusi diperkaya dengan forum tanya jawab dengan peserta.

A. Strategi Pengembangan Aparatur Jawa Barat dalam Era Revolusi Industri 4.0

Disampaikan oleh **Dr. Muhammad Taufiq, DEA.**

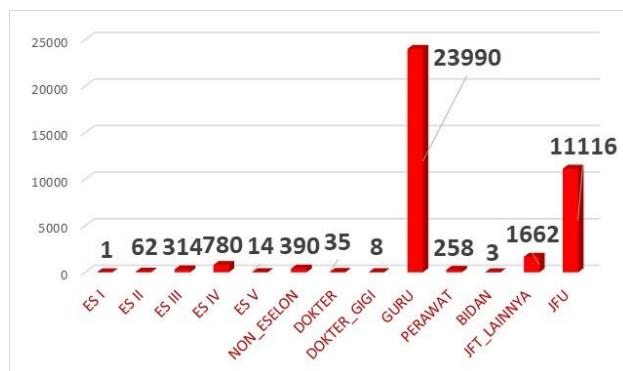
Deputi Kajian Kebijakan

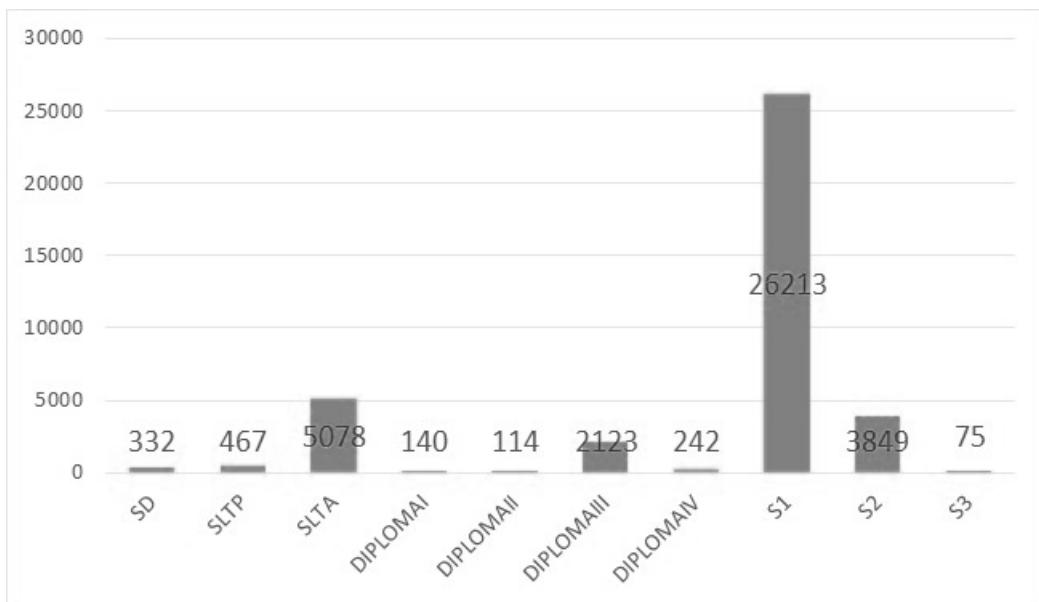
Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia

Sebagaimana diketahui, rumusan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang baru adalah "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi". Visi tersebut selanjutnya diturunkan kedalam beberapa rumusan misi sebagai berikut: 1) Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban; 2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; 3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan koneksi wilayah dan penataan daerah; 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jabar Juara Lahir Batin tersebut, inovasi dan kolaborasi menjadi prasyarat (*prerequisites*) bagi penyelenggaraan pemerintahan Jawa Barat kedepan.

Dilihat dari Profil PNS yang ada di Provinsi Jawa Barat, dari total 38.633 PNS, sebanyak 23.990 adalah guru dan 11.116 adalah Jabatan Fungsional Umum (JFU). Sementara itu, bila dilihat dari profil PNS berdasarkan tingkat pendidikan, sebesar 67.85% atau sebanyak 26.213 orang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1). Lebih rinci mengenai data tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.

Gambar 1.1 Profil Pegawai Pemprov Jabar Berdasarkan Jenis Jabatan





Gambar 1.2 Profil Pegawai Pemprov Jabar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dengan mayoritas ASN Jawa Barat adalah guru dan pemangku Jabatan Fungsional Umum, Pemprov Jabar memiliki PR besar untuk mengembangkan kompetensi ASNnya secara keseluruhan dengan melengkapi *skills* ASN sebagaimana yang dituntutkan oleh RI 4.0 yaitu *skills* terkait *human touch* seperti inovasi, kreatifitas, *complex problem solving*, dsb yang tidak dapat digantikan oleh Robot, *Artificial Intelligent, and Internet of Things*.

Selanjutnya, dilihat dari data kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kementerian PANRB, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1, dalam konteks Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa barat masih dihadapkan pada "PR" untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini terlihat dari notifikasi berwarna kuning pada indikator persentase instansi pemerintah yang memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi kategori "B" ke atas. Sementara Pemerintah Kabupaten Kota di lingkup Jawa Barat juga masih memiliki "PR", terlihat dari notifikasi warna merah pada indikator tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karenanya selanjutnya perlu dikembangkan pendekatan Reformasi Birokrasi yang tidak berdasar formalitas dan dokumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangka menyongsong Revolusi Industri (RI) 4.0, orientasi Reformasi Birokrasi harus didesain berubah dari *transactional reform* yang bercirikan: *reward and punishment, control, procedural, standardization* dan *rule driven*, menjadi *transformational reform* dengan mengedepankan *creative learning, collaborative, entrepreneurial, innovation* dan *customer citizen driven*. Dengan demikian, harapannya kedepan, bisnis proses di birokrasi menjadi efisien.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Pemerintah

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capalan 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Opini WTP atas Laporan Keuangan¹⁰								
a. Kementerian/Lembaga	%	74,00	78,00	65,00	82,00	86,00	95,00	●
b. Provinsi	%	52,00	57,00	85,00	64,00	NA	85,00	●
c. Kabupaten	%	30,00	36,00	54,00	42,00	NA	60,00	●
d. Kota	%	41,00	46,00	65,00	51,00	NA	65,00	●
Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP)¹¹								
a. Kementerian/Lembaga	%	60,24	65,00	76,62	70,00	85,37	85,00	●
b. Provinsi	%	30,30	39,00	50,00	48,00	64,71	75,00	●
c. Kabupaten/Kota	%	2,38	11,50	8,60	21,00	14,53	50,00	●
Percentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori "B" ke atas)¹²								
a. Kementerian/Lembaga	%	47,00	53,00	86,84	59,00	92,68	75,00	●
b. Provinsi	%	NA	20,00	8,82	30,00	38,24	60,00	●
c. Kabupaten/Kota	%	NA	5,00	9,60	15,00	37,29	45,00	●
Skor Integritas Pelayanan Publik¹³								
a. Pusat	Skor 0-10	7,22	NA	NA	NA	NA	NA	NA
b. Daerah	Skor 0-10	6,82	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tingkat Kepatuhan K/L/Pemda Dalam Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau)¹⁴								
a. Kementerian	%	64,00	70,00	27,27	80,00	44,00	100,00	●
b. Lembaga	%	15,00	25,00	20,00	35,00	66,67	100,00	●
c. Provinsi	%	50,00	60,00	9,00	70,00	39,39	100,00	●
d. Kab/Kota	%	5,00	10,00	5,26	20,00	22,14	60,00	●

Bergulirnya Revolusi Industri (RI) 4.0, yang dicirikan oleh cyber physical system, internet of things and biotechnology, tentunya menuntut kita untuk melakukan perubahan pada acara kerja organisasi sektor publik dari *tradisional* ke *disruptive*. Artinya, perlu adanya perubahan dari yang semula *resources focused* menjadi *knowledge intensive*, dari yang semula *labour intensive* menjadi *high skill talent*, dari yang semula tinggi tingkat *control*-nya menjadi fokus pada *collaboration*, dari yang semula *vertical command based* menjadi *horizontal trust based*, dari yang semula *mass production* menjadi *mass collaboration*, dari yang semula berorientasi pada *proximity service* menjadi *location less significant*, dan dari yang sebelumnya bersifat *rigid* berubah menjadi *flexible*.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam rangka menyongsong RI 4.0, cara kerja organisasi sektor publik harus mulai berbasis pada *intensive knowledge* dan *high skills talent*. Terkait dengan hal tersebut, menurut World Economic Forum 2017, beberapa skills yang diperlukan dalam menjawab tantangan RI 4.0 antara lain adalah: *complex problem solving*, *critical thinking*, *creativity*, *people management*, *coordinating with others*, *emotional intelligent*, *judgement and decision making*, *service orientation*, *negotiation*, dan *cognitive flexibility*.

Dalam rangka pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk menjawab tantangan RI 4.0 tersebut, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: 1) Kurangnya komitmen dan perhatian pimpinan terhadap pengembangan pegawai; 2) Pengembangan pegawai dianggap sebagai beban

biaya bukan sebagai investasi; 3) Dominannya orientasi formalitas dalam pengembangan pegawai; dan 4) Pengembangan pegawai kurang dikaitkan dengan pola karir.

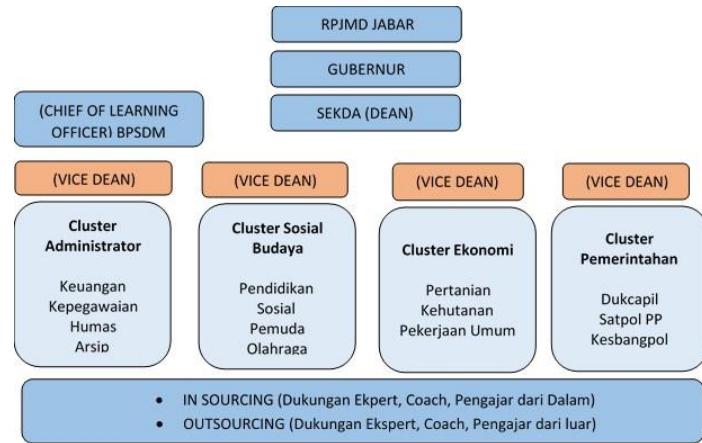
Salah satu solusi yang dapat diambil dalam pengembangan kompetensi ASN adalah dengan membangun Corporate University yaitu "... Entitas pendidikan yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung organisasi induknya dalam mencapai misinya dengan menyelenggarakan kegiatan yang mendorong pengembangan pengetahuan, kearifan serta pembelajaran individu dan organisasi (Allen, 2002: p.9). Lebih jelas mengenai konsep penerapan Corporate University dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Aplikasi Penerapan Corporate University

Pusdiklat	Corporate University	Univeristas	Corporate University
Training	Training	Degree program (memberikan gelar)	No degree (tidak bergelar)
	<ul style="list-style-type: none">• Career Planning• Succession Planning• Knowledge Management• Culture change• Working Place Learning	Learning melalui proses belajar mengajar	Learning dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan pengembangan karir
Taktis melaksanakan program pelatihan yang ditetapkan oleh kebijakan	Strategis: pengembangan kompetensi sesuai tuntutan strategi organisasi		

Berdasarkan konsep tersebut, pengembangan kompetensi dalam rangka menyongsong RI 4.0, Pemerintah Jawa Barat dapat mengembangkan *Corporate University* yaitu sebuah cara pembelajaran baru yang didesign dengan menurunkan RPJMD kedalam program-program pembelajaran dalam bentuk *cluster-cluster knowledge* yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh SKPD. Lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses pembelajaran sebagian besar dilakukan ditempat kerja dengan *dynamic learning system* yang terbagi kedalam beberapa level: 1) level strategic untuk mengidentifikasi dan mengakusisi pengetahuan dan ketrampilan baru; 2) level organisasi/pekerjaan yang dimaksudkan untuk memenuhi gap kompetensi dan kinerja pegawai, dan 3) level operasional yang dimaksudkan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dan inovasi. Lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:



Selain menerapkan prinsip Corporate University, Provinsi Jawa Barat juga dapat mengembangkan **Laboratorium Inovasi Strategis Terpadu** melalui Dialog Intensif antar elemen terkait sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



B. Reformasi Birokrasi Jawa Barat: Urgensi, Tantangan, dan Strategi

Disampaikan oleh **H. Iwa Karniwa S.E., Ak., M.M., CA., PIA.**

Sekretaris Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan visi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Gambaran Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember sebanyak 48,04 juta warganya, dan sekarang sudah hampir 50 juta, Jawa Timur sudah hampir 35 juta. Warga Jawa Barat asal Jawa Timur hampir 3 juta, sementara warga Jawa Barat asal Jawa Tengah hampir 2 juta, dan lebih unik lagi warga Sumatra Barat kan 4 juta totalnya, hampir 1 jutanya ada di Jawa Barat. Dengan kebijakan di Provinsi Jawa Barat dengan anggaran yang terbatas maka diarahkan kepada empat hal yaitu: (1) bagaimana meningkatkan anggaran pendidikan dengan tata kelolanya, (2) bagaimana meningkatkan anggaran kesehatan dengan tata kelolanya, (3) bagaimana meningkatkan anggaran infrastruktur dengan tata kelolanya, dan (4) bagaimana meningkatkan daya saing. Kebijakan yang sudah ada sudah tepat, sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 adalah 5,29 % diatas rata-rata nasional. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak ada artinya apabila inflasi tidak dikendalikan. Salah satu solusi yang dilakukan adalah bagaimana menjaga inflasi tetap wajar. Hasil kerjasama luar biasa dengan Polda Jabar dan beberapa pihak lainnya termasuk juga Kadin, sehingga inflasi bisa kita jaga hingga 3,37%. Hal ini kemudian bisa juga menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Ada beberapa perlu ditingkatkan ke depan yaitu penyediaan air minum masih sekitar 73 % dan IPM yang masih perlu didorong lagi.

Oleh karena itu, Langkah kedepan yang perlu didorong ke depan adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi sekaligus sebagai pelaku kaitannya dengan RI 4.0. Apabila dilihat dari tahapan RI di dunia, maka saat ini posisi Indonesia ada di posisi pertama, kedua dan ketiga (1784-1969), karena sawah masing menggunakan manusia, hewan. Lalu, bagaimana Provinsi Jawa Barat mampu mengejar posisi keempat? Hal ini luar biasa berat, maka Provinsi Jawa Barat melakukan transformasi besar-besaran. Adapun langkah yang digaungkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: melakukan reformasi diri sendiri, Pertama, reformasi ASN. Kedua. reformasi birokrasi yangujungnya laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari 27 Kabupaten/Kota, 3 yang belum yaitu Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan Bandung Barat. Oleh karena itu, Sekretaris Daerah akan turun langsung untuk membantu Kota Bandung menyangkut asset, Kabupaten Subang juga demikian. Ketiga, nilai LAKIP harus A. Bagaimana agar mendapatkan nilai A, syaratnya adalah bagaimana proses penganggaran sesuai visi misi dan bisa menurunkan kemiskinan dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Apabila mampu memperoleh nilai A, maka akan terjadi efisiensi besar-besaran dari Kepala

Dinas, eselon III sampai staf. Apabila nanti nilainya A, maka nanti APBD dapat menurunkan angka kemiskinan. Apabila nilainya masih C atau CC maka itu berarti masih ada ketidaksesuaian antara visi misi dengan kegiatan-kegiatan di SKPD. Terakhir adalah Laporan penyelenggaran pemerintahan daerah harus sangat baik. Dengan WTP, LAKIP A dan Laporan penyelenggaraan Pemda Sangat Baik, kalau itu terjadi, Pemerintah Kabupaten Kota bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Hal tersebutlah yang harus dilakukan bersama-sama.

Selanjutnya di Era sekarang, sebagaimana disampaikan tadi bahwa Jawa Barat adalah salah satu kunci bagaimana Indonesia maju. Indonesia bisa jadi 4 besar di dunia setelah Amerika, Cina dan India termasuk Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi jika memenuhi syarat yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi harus minimal 6,5%, Jawa Barat mampu menjaga di Triwulan I sebesar 6,02 % syaratnya adalah infrastruktur, makanya Pemda Provinsi Jawa Barat mendorong pembangunan infrastruktur yaitu 16 jalan tol, Bandara Kertajati yang lebih besar dari Soekarno Hatta, Pelabuhan Patimban yang lebih besar dari Tanjung Priok. Kedua, bagaimana generasi milenial menggunakan website, internet dan sosial media secara efisien dan produktif. Hasil studi penggunaan media sosial dan internet tidak ada makna dan mubazir. Hal ini yang didorong agar penggunaan internet efektif dan produktif artinya digunakan untuk belajar meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Dan yang terakhir, ketiga adalah produk domestik bruto dan proses transisi kepemimpinan dan kekuasaan berjalan secara damai dan kondusif dan Provinsi Jawa Barat wajib mendorong hal tersebut dimana proses transisi pemerintah dari gubernur lama ke gubernur baru berjalan dengan baik dan kita berharap agar proses transisi pemerintahan dari presiden ke presiden berikutnya juga berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang menjadi indikator agar Indonesia mampu menjadi negara yang maju.

C. Peluang Ekonomi Digital di Jawa Barat dan Peran Pemerintah Daerah

Disampaikan oleh **Agung Suryamal Sutisno**

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Jawa Barat

Tantangan dunia usaha di Indonesia di Era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) saat ini adalah terbukanya perdagangan bebas diantara negara-negara ASEAN yang tergabung dalam MEA dan ekspansi perdagangan Cina ke Indonesia. Adapun permasalahan yang dihadapi para pengusaha adalah modal usaha yang kurang dan penguasaan teknologi yang rendah.

Globalisasi merupakan suatu proses menyeluruh/mendunia dimana setiap orang tidak terikat oleh negara/batas-batas wilayah dan setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media-media elektronik dan cetak. Sementara itu, globalisasi ekonomi merupakan peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional dan internasional di seluruh dunia intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi dan modal lintas batas. Globalisasi telah memberikan dampak bagi Indonesia baik positif maupun negatif. Dampak positif globalisasi bagi Indonesia antara lain : (1) dapat menyerap kemajuan IPTEK secara cepat, (2) mempermudah arus modal dan barang dari dalam negeri ke negara lain, begitu juga sebaliknya, dan (3) meningkatkan perdagangan internasional produk dan jasa dari Indonesia. Sementara dampak negatifnya adalah kaburnya jati diri bangsa Indonesia dan masuknya kebiasaan-kebiasaan diri wilayah/negara lain yang buruk karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu dampak globalisasi yang harus dihadapi Indonesia adalah bergabungnya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA ini bertujuan untuk mengintegrasikan negara-negara ASEAN dalam hal perdagangan, dunia usaha, dan produk-produk barang bebas masuk di antara negara ASEAN. Oleh karena itu, yang perlu disiapkan adalah bagaimana kesiapan pengusaha di Indonesia menghadapi dampak tersebut. Apabila dilihat dari sisi modal, pengusaha di Indonesia memiliki modal yang relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya, sehingga para pengusaha di Indonesia harus kreatif dan inovatif. Selain itu, Cina saat ini sudah membangun jalan sutra perdagangan yang saat ini sudah sampai Myanmar dan kedepan sampai ke Indonesia, sehingga bisa

jadi negara Indonesia bisa diekspansi oleh negara Cina. Banyak produk dari negara Cina yang masuk ke Indonesia sehingga perlu diatasi dengan meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam pengelolaan produk Indonesia.

Disisi lain, perkembangan teknologi di era global juga turut mempengaruhi perkembangan ekonomi global. RI 4.0 adalah sebuah sistem kerja industri yang berjalan secara otomatis keseluruhan dengan memanfaatkan sistem siber-fisik, internet untuk seluruh aktifitas, komputasi awan dan komputasi kognitif (kecerdasan buatan). Sektor bisnis pendukung Industri 4.0 adalah: makanan-minuman, kimia, TPT, elektronik, otomotif, bisnis jasa data dan informasi, dan industri kreatif. Dampak RI 4.0 terhadap dunia usaha di Jawa Barat adalah:

1. terjadinya penurunan penyerapan tenaga kerja, sebagai akibat beralihnya penggunaan tegana manusia dengan teknologi,
2. terciptanya proses globalisasi dalam dunia usaha, sebagai akibat meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam bisnis,
3. semakin biasnya batas wilayah karena mungkin saja bagian atau rangkaian produksi dilakukan secara terpisah tempatnya,
4. terwujudnya kompetisi produk secara internasional dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di Jawa Barat, dan
5. tercipta efektifitas biaya logistik karena konsumen langsung berhubungan dengan produsen secara langsung.

Adapun strategi dunia usaha dalam menghadapi RI 4.0 antara lain: (1) menciptakan produk unggulan, dengan berinovasi, dan meningkatkan kreatifitas sehingga tercipta keunggulan dari segi kualitas dan kuantitas, (2) melakukan riset pasar dalam pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini, dan (3) memaksimalkan serta meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi informasi yang akan dipergunakan di dalam seluruh aktifitas kegiatan usahanya. Sementara itu, harapan dunia usaha terhadap Pemerintah Daerah dalam menghadapi RI 4.0 adalah: (1) peningkatan profesionalisme ASN dalam melayani dunia usaha di dalam era RI 4.0 dengan lebih menguasai teknologi informasi, (2) membuat regulasi-regulasi yang lebih ramah terhadap dunia usaha dengan bersinergi dengan dunia usaha (KADIN) untuk mencari apa saja yang dibutuhkan dunia usaha dalam regulasi tersebut, dan (3) memaksimalkan pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang dalam berusaha yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi terbaru.

Dunia Usaha yang diwakili oleh KADIN sebagai payung organsiasi dunia usaha akan selalu berperan aktif baik diminta maupun tidak dalam keterlibatan pembuatan regulasi dan hal-hal lainnya, khususnya dalam kaitannya dengan dunia usaha dan perekonomian. Adapun peran KADIN dalam mendorong perekonomian Indonesia saat ini adalah:

1. Mendorong kreativitas dan inovasi para pengusaha (UMKM)
2. Mendorong para pengusaha (UMKM) melek digital melalui pelatihan-pelatihan
3. Mendorong para pengusaha Jabar berorientasi ekspor
4. Selalu berperan aktif dalam *collaborative governance* dengan pemerintah

D. Dukungan Telkom dalam Era Revolusi Industri 4.0 pada Kemitraan Pemerintah Daerah menuju Ekonomi Berbasis Digital

Disampaikan oleh **Ignatius Wiseto Prasetyo Agung**

Vice President Digital Strategy

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Terdapat tiga bagian yang dipersiapkan dalam paparan Telkom yang bersifat *practical*, yaitu

1. Teknologi Indonesia at a Glance, perkenalan mengenai Telkom

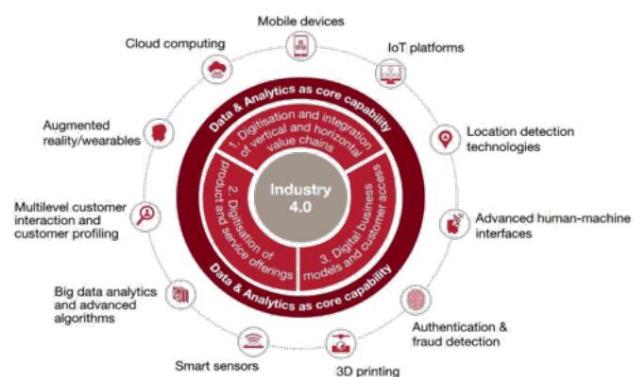
2. Industry 4.0 dan Digital Phenomenon
3. Telkom Digital Initiatives, Collaboration Use Cases and Products/Solution in Main Public Service (ide untuk implementasi langsung di lapangan, mencakup beberapa inisiatif yang sudah dilakukan oleh Telkom, contoh-contoh atau *use case*, serta solusi untuk *government*).

Teknologi Indonesia at a Glance, perkenalan mengenai Telkom

Tentang Telkom dimiliki oleh masyarakat Indonesia, karena mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 52%, dan sisanya terdapat di bursa saham Jakarta dan *stock exchange* New York. Bisnis Telkom bukan hanya di bidang telekomunikasi, tapi juga informasi, media, *edutainment*, dan *solution*. Telkom mempunyai kurang lebih 43 anak perusahaan. Telkom juga telah ada di 11 negara di luar Indonesia, yaitu Singapura, Hongkong, Timor Leste, Taiwan, Malaysia, Australia, Myanmar, Macau, USA, Arab Saudi, dan New Zealand. Telkom merupakan salah satu kebanggaan Indonesia karena diakui di dunia luar (expand ke luar).

Industry 4.0 dan Digital Phenomenon

Pada intinya adalah kolaborasi antar manusia, dan bagaimana juga mengenai big data, bagaimana data-data yang dimiliki bisa mendrive apa saja yang dapat dikolaborasikan.



Seperti gambar di atas, Industri 4.0 berada di tengah, dikelilingi oleh big data (lingkaran kedua). Semua data yang ada, disadari atau tidak sebetulnya sudah ada yang merekam. Gmail contohnya. Begitu kita log in, artinya data kita telah direkam. Kita pergi kemana saja, gmail atau google telah mengetahui keberadaan kita. Sehingga pada saat dari rumah menuju ke tempat ini (Jatinangor) menggunakan google map, langsung dicari rutenya, itu pun telah ada yang merekam. Data-data seperti ini harus digunakan dengan hati-hati. Kita sebagai warga Indonesia dapat memanfaatkan data tersebut untuk kemaslahatan bangsa.

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa populasi dunia mencapai 7,6 Miliar, 55 % nya adalah masyarakat urban. Internet user nya mencapai 54%. Kemudian yang menggunakan unique mobile users mencapai 67 %. Yang aktif menggunakan sosial media mencapai 44 %, dan yang aktif sebagai sosial media menggunakan mobile mencapai 40 %. Hal inilah yang menghasilkan *disruptive business model*. Contohnya seperti Traveloka. Mereka tidak mempunyai hotel, bisa memiliki omset hingga triliunan rupiah. *Kedua*, Facebook. Ini bukan media, tidak punya konten, namun hingga saat facebook merupakan media terbesar. Dua contoh tersebut terjadi karena teknologi digital.

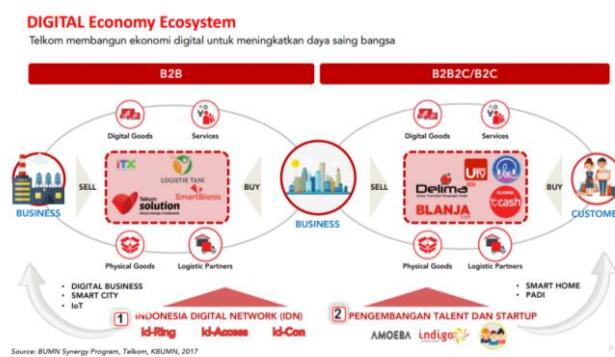
Pada tahun 2006, terdapat 1 perusahaan yang berbasis teknologi digital, namun pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang menggunakan teknologi digital bertambah hingga 6 perusahaan. Intinya adalah bahwa sekarang kita sudah mulai bergeser ke teknologi digital. Mau atau tidak, disadari atau tidak faktanya perubahan ke teknologi digital sedang terjadi.

Di Indonesia, dari total populasi, sebanyak 56 % adalah masyarakat urban. 50 % penduduknya atau sekitar 132,7 juta menggunakan internet. Kemudian yang menggunakan sosial media mencapai 49 %, yang aktif menggunakan mobile sebanyak 67 %, dan yang aktif menggunakan sosial media di mobile mencapai 45%. Dilihat dari angka pertumbuhannya luar biasa. Apabila dibandingkan dengan negara lain, indonesia berada pada posisi ketiga pertumbuhan pengguna sosial media yang terbesar setelah China dan India. Makanya tidak mengherankan apabila banyak investor asing (pemodal asing) melirik pasar di Indonesia. Hal ini dapat dimanfaatkan sekaligus diwaspadai bagaimana *capital* yang masuk bisa masuk dan bermanfaat untuk Indonesia.

Terdapat empat kategori potensi digital ekonomi di Indonesia, yaitu (1) *On Demand Service* (para pemainnya seperti gojek, grab, ruangguru, sejasa.com); (2) *Financial Technology* (Fintech), misalnya kitabisa.com, dompetku, uangteman, kartuku); (3) *Internet of Things* (para pemainnya seperti qhue, efishery, cubeacon); dan (4) *E-Commerce* (para pemainnya seperti blanja, bukalapak, bhinneka.com, tokopedia, olx, blibli.com).

Telkom Digital Initiatives, Collaboration Use Cases and Products/Solution in Main Public Service

Bagian ini akan ditekankan dengan lebih detail supaya dapat dimanfaatkan bersama. Gambar berikut menunjukkan ekosistem digital ekonomi.



Gambar sebelah kiri menunjukkan *business to business*, dan gambar sebelah kanan adalah *business to business to consumer* atau *business to consumer business*. Barang yang diperdagangkan bervariasi dapat berbentuk barang fisik, ataupun barang digital (seperti *games*). Kemudian yang berperan di sini seperti logistik, karena logistik berperan penting pada digital ekonomi dan menjadi salah satu bisnis yang perlu ditingkatkan. Bagaimana dengan digital ekonomi, barang-barang dapat tersalur dengan mudah ke seluruh pelosok Indonesia.

Terdapat beberapa hal yang telah dilakukan atau didukung oleh Telkom untuk digital ekonomi. Pertama, dari sisi infrastruktur (digital network), telkom telah menyiapkan baik dari sisi jaringan antar kota melalui kabel laut ataupun yang di area-area, broadband hingga ke rumah-rumah, dan juga melalui mobile. Telkom pun telah memiliki satelit yang orbitnya berlokasi di 1080 bujur timur dan memiliki kapasitas 60 transponder.

Kemudian Telkom pun telah berperan dalam Global Digital Hub. Internet bersifat global. Indonesia jangan mau hanya menjadi pemain lokal, oleh karena itu, Telkom telah menyiapkan hub. Hal ini dilakukan agar ke depannya Indonesia dapat menjadi hub (titik pusat) untuk Asia Tenggara dan berbagai negara di penjuru dunia. Telkom telah memiliki hub laut yang mengarah ke Eropa, Amerika, Australia dan juga Asia dan sekitarnya.

Kedua, dari sisi talent atau orang-orang yang berbakat untuk digital ekonomi. Telkom telah menyiapkan Program INDIGO. Telkom bekerja sama dengan pasar-pasar rintisan lokal dengan memberikan fasilitas baik berupa pendanaan, maupun mentoring (mentorship), maupun akses ke

network/customer Telkom. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 18.198 talent yang mengikuti program talent tersebut, kemudian yang sampai mendapatkan pendanaan dari luar berjumlah 17 startups (ini dari sisi kerjasama dengan pihak luar).

Kemudian untuk pihak internal, Telkom telah melakukan program sejenis yang diberi nama AMOEBA. Program ini dimaksudkan untuk mendidik karyawan Telkom supaya lebih digital. Konsepnya mirip dengan kerja luar. Jadi para inovator internal pun difasilitasi untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang bisa bermanfaat.

Beberapa hasil dari startup-startup program INDIGO yang sudah cukup berhasil, diantaranya

1. Kata.ai adalah startup yang bergerak di bidang artifisial intelegent (kecerdasan buatan) yang berfungsi untuk membantu developer startup memiliki chatbot sendiri.
2. Nodeflux adalah startup yang menyediakan sebuah layanan analisis video yang selaras dengan tren kota cerdas, misalnya mengidentifikasi kendaraan yang melaju di jalan melalui CCTV. Selain itu juga mendeteksi wajah di CCTV tanpa harus terus-menerus melakukan pantauan.
3. ANGON merupakan startup yang menyediakan platform beternak online yang memudahkan penggunanya untuk beternak secara online melalui aplikasi mobile, tanpa harus memiliki lahan, keterampilan, dan waktu untuk merawat hewan ternak berupa domba atau sapi.
4. GROWPAL merupakan startup yang memberikan layanan yaitu mempertemukan antara pemilik modal, investor, sponsor, pemilik lahan, petani ikan laut, dan pembeli hasil panen dibidang agribisnis perikanan. Omsetnya sudah milyaran

Kemudian, Telkom bekerja sama dengan BUMN lain untuk mengelola rumah kreatif BUMN. Maksud serta tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dalam menembus pasar global di era digital. Di samping itu, rumah kreatif BUMN ini dibentuk juga untuk meningkatkan wawasan dan daya saing para pelaku UKM di Indonesia, khususnya melalui pelatihan operasional pemasaran online dan listing penjualan produk si situs e-commerce Blanja.com.

Aktivitas yang dikembangkan di rumah kreatif BUMN ini antara lain (1) pembinaan bersama antar BUMN berbasis kurikulum, dengan flow "Go Modern, Go Digital, Go Online, Go Global"; (2) peningkatan profesionalisme marketing, termasuk packaging and branding, dengan jangkauan market nasional/global melalui Blanja.com; (3) pembinaan produk unggulan, dengan BUMN sebagai pembina, yaitu fashion (Mandiri), food (BNI), serta craft (BRI). Adapun BUMN yang terlibat kerjasama dalam rumah kreatif BUMN dengan antara lain BNI, BRI, BTN, Mandiri, Pertamina, PLN, Jasa Raharja, Pelindo, IPC, Angkasa Pura, PGN, Pegadaian, Bukit Asam, PP, Pupuk Indonesia, RNI, Semen Indonesia, Waskita, Bulog, Jasamarga, WIKA, dan Inalum.

Beberapa produk yang dapat dikembangkan guna menciptakan *government digitalization*, antara lain:

No.	Produk Telkom	Penggunaan
1.	Government Management Sector	<ul style="list-style-type: none">✚ E-Office (diimplementasikan di 12 kabupaten/kota)✚ E-Budgeting (diimplementasikan di 7 departemen/kabupaten/kota)✚ E-Kelurahan (diimplementasikan di 6 kabupaten/kota)
2.	Security Sector	<ul style="list-style-type: none">✚ SPGDT 119 (diimplementasikan di 30 kabupaten/kota)✚ Command Center (diimplementasikan di 19 departemen/kabupaten/kota)✚ CCTV Analytics (diimplementasikan di 5 kabupaten/kota)
3.	Resource and Local Asset Sector	<ul style="list-style-type: none">✚ Smart Lighting (diimplementasikan di 3 kabupaten/kota)✚ E-PHRI (diimplementasikan di 3 kabupaten/kota)

No.	Produk Telkom	Penggunaan
		<ul style="list-style-type: none"> ➡ E-Pasar (diimplementasikan di Bandung)
4.	Transportation Sector	<ul style="list-style-type: none"> ➡ E-Ticketing System (diimplementasikan di 4 kabupaten/kota) ➡ Fleet Management (diimplementasikan di 6 departemen/kabupaten/kota) ➡ Smart/E-Parking (diimplementasikan di 3 kabupaten/kota)
5.	Tourism Sector	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Hi-City (diimplementasikan di 10 kabupaten/kota) ➡ Smart Eye VR 360 (diimplementasikan di DKI Jakarta) ➡ Immersive Solution (akan diimplementasikan di Yogyakarta)
6.	Citizen Participation Sector	<ul style="list-style-type: none"> ➡ E-Pelaporan (diimplementasikan di 3 departemen/kabupaten/kota) ➡ Local Blast Ads (diimplementasikan di 5 departemen/kabupaten/kota) ➡ Social Media Analytics (diimplementasikan di 5 departemen/kabupaten/kota)
7.	Environment Sector	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Waste Management (diimplementasikan di Bandung) ➡ Early Warning System (diimplementasikan di 3 kabupaten/kota) ➡ Water Treatment (diimplementasikan di 1 kabupaten/kota)
8.	Health Sector	<ul style="list-style-type: none"> ➡ E-Puskesmas (diimplementasikan di 1103 Pusat Kesehatan) ➡ Hi-Sys (diimplementasikan di 25 rumah sakit dan 68 klinik) ➡ Mobile Obstetric (diimplementasikan di 3 kabupaten/kota)
9.	ICT Infrastructure Sector	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Astinet (diimplementasikan di lebih dari 300 kabupaten/kota) ➡ Mangoesky (diimplementasikan di 886 titik) ➡ Wifi station (diimplementasikan di lebih dari 300 kabupaten/kota dan 22.500 <i>access points</i>)
10.	Education Sector	<ul style="list-style-type: none"> ➡ PPDB Online (diimplementasikan di 83 kabupaten/kota) ➡ Sicipin (diimplementasikan di 2 kabupaten/kota) ➡ PaDi (diimplementasikan di 1000 lokasi)

Artikel dan Data Kuesioner

Strategi untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap tema lokakarya, yakni "Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" dilakukan dengan cara memberikan informasi pengantar mengenai Reformasi Birokrasi dan ketiga komponen yang ditawarkan sebagai *key leverage* dalam percepatan pencapaiannya. Informasi ini disusun dalam bentuk empat artikel yang disebarluaskan melalui media sosial dan bagian dari *handout* untuk peserta.

Sementara itu, untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi peserta terhadap pelaksanaan RB dan pemanfaatan ketiga komponen pengungkit di atas, maka disebarluaskan kuesioner. Hasil kuesioner tersebut kemudian dideskripsikan di bawah ini.

A. Artikel 1: Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Ditulis oleh: **Krismiyati**

APA REVOLUSI INDUSTRI 4.0?

Dewasa ini, Indonesia dan seluruh dunia sedang dihadapkan pada satu isu krusial, yakni Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai dengan hadirnya *disruptive technology* yaitu perubahan-perubahan fundamental berupa penetrasi teknologi sebagai konsekuensi dari fenomena *internet of things*, big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga *artificial intelligence*. Disruptif ini terjadi begitu cepat dan sangat mengancam cara kerja organisasi. Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan masif menuntut berbagai pihak untuk adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Hal ini penting agar industri-industri yang ada tetap bisa bersaing, menjadi lebih produktif dan efisien berhadapan dengan kompetitor baik dalam maupun luar negeri.

IMPLIKASI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PADA BIROKRASI

Secara konseptual, Revolusi Industri 4.0 memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi global dan upaya pengurangan kemiskinan dunia. Namun demikian, Revolusi Industri 4.0 yang terjadi saat ini yang berpotensi mendatangkan keuntungan, dapat juga menjadi ancaman bila tidak diantisipasi. Hal ini karena ketika industri berubah, karakter pekerjaannya tentunya juga berubah, akibatnya tuntutan keterampilan (*skill*) yang dibutuhkan juga berubah. Selanjutnya, dari sini tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana memastikan tenaga kerja kita memiliki *skill* yang dibutuhkan. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional di kancang global, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai 10 besar ekonomi dunia di 2030. Meskipun disruptif teknologi terutama mengancam sektor swasta, namun sektor publik tentunya tetap menjadi bagian dari proses perubahan tersebut. Birokrasi memang diatur dengan undang-undang tersendiri, namun birokrasi tentu saja tidak bisa mengambil jarak dan memposisikan diri sekedar sebagai penonton. Sebaliknya, birokrasi harus berdiri sebagai ujung tombak dari proses perubahan tersebut. Fenomena disruptif yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan kemajuan pesat teknologi, akan membawa kita pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain. Dari sini, transformasi organisasi pemerintah kemudian menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparatur pemerintah agar responsif terhadap perubahan.

POSITIONING BIROKRASI INDONESIA SAAT INI?

Dilihat dari beberapa indikator, *positioning* birokrasi di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan indikator Kemudahan Berbisnis (*Ease of Doing Business*), Indonesia menempati ranking 72 masih jauh dibawah negara-negara di Kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (ke-2), Malaysia (24), Brunei Darussalam (56) dan Vietnam (68). Sementara itu, berdasarkan Global Human Capital Report 2017, kualitas SDM Indonesia berada pada ranking 65 dari 113 negara, dibawah Singapura (11), Malaysia (33), Thailand (40), Filipina (50). Selanjutnya, berdasarkan indikator *daya saing*, *Global Competitiveness Index tahun 2017* menempatkan Indonesia pada ranking 36, berada dibawah Malaysia (23) dan Thailand (32). Dari indikator *government effectiveness*, Indonesia berada pada posisi 102 dari 192 negara dibawah Singapura (1), Malaysia (43), Thailand (62) dan Filipina (79). Dengan mempertimbangkan berbagai posisi ini, kedepan kita butuh upaya lebih serius untuk merespon berbagai tantangan yang merupakan implikasi dari bergulirnya Revolusi Industri 4.0. Lebih lanjut, bila dikaitkan dengan konteks Jawa Barat, agenda Reformasi Birokrasi masih perlu banyak memperoleh perhatian. Jawa Barat dengan heterogenitas penduduk, potensi wilayah dan topografinya tentu memiliki tantangan tersendiri untuk dapat menciptakan momentum perubahan dalam rangka menyongsong Revolusi Industri 4.0.

POINTERS PENTING UNTUK DIKONTEMPLASIKAN

Untuk itu, beberapa hal yang perlu dicarikan jalan keluar dan strateginya adalah sebagai berikut:

- Bagaimana strategi pemerintah dalam membangun *collaborative governance* dalam rangka mengoptimalkan peluang (*opportunities*) yang ditawarkan oleh Revolusi Industri 4.0 serta dalam rangka mengatasi keterbatasan sumberdaya (*resources*) yang dimiliki? Bagaimana strategi yang diperlukan untuk menginisiasi hingga mengelola program-program kolaboratif atau perluasan jejaring kerja dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan baik dengan pihak swasta, NGO, perguruan tinggi, masyarakat maupun pihak lainnya.
- Bagaimana strategi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya yang dapat mendukung penguatan daya saing Indonesia di kancah global?
- Bagaimana strategi pengembangan inovasi di bidang pemerintahan agar tidak sekedar bersifat *trouble-shooting* tetapi juga memperhatikan aspek keterpaduan (*integrasi*) dan keberlanjutan (*sustainability*) antar sektor terkait serta bagaimana strategi mentransformasi budaya inovasi dan adaptif di birokrasi baik Pusat maupun Daerah.

B. Artikel 2: Menyuntikkan Virus Kolaborasi dalam Mereformasi Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0

Ditulis oleh: Shafiera A., Agus W., & Utari

Revolusi Industri (RI) 4.0 sedang berlangsung dan terejawantahkan dalam berbagai sendi kehidupan dalam bentuk dan intensitas yang berbeda-beda. RI 4.0 yang dicirikan dengan penggunaan *Internet of Things* (IoT), *big data*, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (*Artificial Intelligence*) telah diadopsi pula dalam dunia birokrasi. Hal ini terlihat dari berbagai disruptif dalam pelayanan publik, seperti penggunaan *big data* untuk mempercepat *delivery* pelayanan kepada masyarakat. Contoh lain adalah penggunaan *Internet of Things* (IoT) sebagai media berinteraksi dengan masyarakat sehingga mereduksi tatap muka langsung antara aparatur pemerintah dengan pengguna layanan tertentu. Selain berbagai manfaat tersebut, era RI 4.0 juga menimbulkan berbagai

masalah publik yang harus dihadapi pemerintah. Melihat ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah, maka patut dipertanyakan, "Mampukah pemerintah melaksanakan semua sendirian?". Seperti dalam ungkapan Sunda, "*Ulah ngarawu ku siku*", maka akan sangat sulit, bahkan mustahil untuk melaksanakan semuanya. Lalu, bagaimana cara mengelolanya agar tujuan tercapai dengan sumber daya yang ada saat ini?

Kolaborasi

Collaborative governance merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghadapi era R.I 4.0. Dari sudut pandang pemerintah sebagai aktor utama, *collaborative governance* dapat dimaknai sebagai cara memerintah, dimana satu atau beberapa, instansi pemerintah melibatkan *stakeholder* di luar lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan bersama yang bersifat formal, berorientasi konsensus, deliberatif, dan bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik (Ansell dan Gash, 2007). Kolaborasi yang dibicarakan ini bukan sekedar urunan dana dalam pelaksanaan program pemerintah, tapi setiap pihak yang terlibat harus memiliki tujuan bersama dan bersama-sama berperan aktif untuk mewujudkannya.

Salah satu contoh yang menarik di lingkup Jawa Barat adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan program Mini Lab Food Security. Program ini merupakan wujud keinginan bersama untuk menjamin keamanan bahan pangan yang dijual di pasar tradisional maupun modern melalui pengetesan kimiawi terhadap bahan pangan segar, seperti daging dan sayuran, secara *on the spot* di pasar tempat masyarakat berbelanja. Semangat untuk melindungi konsumen ini diusung oleh tiga kelompok besar, dari sisi pemerintah adalah Dinas Pangan dan Pertanian yang berperan memberikan pelatihan pengujian keamanan pangan dan penyediaan sebagian alat tes; lalu Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Bandung yang berperan dalam penyediaan SDM laboran dan lokasi laboratorium di 33 pasar di Kota Bandung; sedangkan dari sisi swasta adalah pemilik pasar modern yang berperan dalam penyediaan SDM sebagai laboran, alat tes, dan lokasi laboratorium. Kebijakan ini dibingkai dalam Peraturan Walikota No. 1151 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pangan pada Mini Lab Food Security di Pasar Modern dan Pasar Tradisional. Hasilnya, supermarket besar, seperti Yogyo Group, Hypermart, Superindo Dago, Setiabudi Supermarket, Carrefour PVJ, Lottemart Soekarno Hatta, dan Giant Pasteur Hyperpoint sudah menyediakan Mini Lab Food Security, bersama 33 pasar tradisional sejak 2016.

Peluang dan Tantangan *Collaborative Governance* di Era RI 4.0

Contoh di atas merupakan satu dari sekian praktek *collaborative governance*. Wujudnya bisa sangat beragam, baik kombinasi aktor-aktor yang terlibat, pembagian peran antar aktor, sumber daya yang disumbangkan, maupun medan penerapannya. Satu hal yang kita sepakati bersama adalah bahwa terdapat peluang, sekaligus tantangan, besar untuk mewujudkan *collaborative governance* dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Apabila kita berniat untuk mereplikasi kisah sukses seperti contoh di atas secara ekstensif dan intensif, maka ada beberapa hal yang harus dipikirkan terlebih dahulu.

- Bagaimana syarat pengembangan jejaring kolaboratif yang saling memampukan?
- Bagaimana menarik partisipasi *stakeholder* di luar pemerintah agar mau menyamakan idealisme, berbagi sumber daya, dan menjalankan perannya masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan bersama?
- Bagaimana fenomena RI 4.0 akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kolaborasi yang dibangun antara instansi pemerintah dengan *stakeholder* eksternal?

Jadi yang perlu diungkap saat ini adalah strategi yang harus dilakukan pemerintah daerah di Jawa Barat dalam membangun *collaborative governance* yang efektif di era R.I. 4.0. Selain itu kita perlu ciptakan bersama strategi dalam mengelola program kolaboratif yang *sustainable* dan memperluas

jejaring kerja dengan pihak swasta, NGO, perguruan tinggi, masyarakat maupun pihak lainnya. (SA; AW; U)

C. Artikel 3: Revolusi Industri 4.0 : Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Reformasi Birokrasi

Ditulis oleh: **Susy Ella & Masrully**

Revolusi industri generasi keempat atau lebih dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0 merupakan era industri termutakhir yang mempengaruhi berbagai aspek, termasuk merambah ke aspek pemerintahan. Pemerintah mau tidak mau harus merespon dan mengikuti perkembangan dengan membenahi diri agar bisa menyesuaikan diri dengan era Revolusi Industri 4.0. Salah satu tulang punggung Revolusi Industri 4.0 dalam mendorong transformasi kehidupan adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Namun kemudian timbul pertanyaan, seberapa besar pemanfaatan TIK di pemerintahan sejauh ini? Bagaimana tantangan dan peluang penggunaan TIK di era Revolusi Industri 4.0 untuk mempercepat reformasi birokrasi?

Pemanfaatan TIK di Lingkungan Pemerintah

Di Indonesia, penggunaan teknologi informasi masih kalah jauh dibandingkan negara lain. Menurut data yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (2017), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia pada tahun 2016 menempati urutan ke 111 dari 176 negara. Walaupun naik 3 peringkat dari tahun sebelumnya namun masih jauh jika dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. IP-TIK merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK (BPS, 2017). Masih jauhnya peringkat Indonesia tersebut, membuat kita harus berupaya untuk mengejar ketertinggalan kita tersebut. Meskipun begitu, penggunaan internet di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia. Laju penetrasi internet Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia, yaitu mencapai 51 % (*Center of Innovation Policy and Governance* (CIPG), 2018). Hal ini merupakan potensi/peluang besar bagi Indonesia untuk mendukung peningkatan penggunaan TIK dalam pelayanan pemerintahan. Tingginya penggunaan internet di Indonesia bisa menjadi faktor pendukung peningkatan pemanfaatan TIK dalam pemerintahan.

Intervensi TIK di lingkungan pemerintah telah dimulai semenjak bergulirnya paradigma *e-government* pada tahun 2001 dimana pemerintahan diharuskan memanfaatkan TIK untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Banyak aplikasi yang telah dikembangkan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan seperti adanya SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) pada pengelolaan administrasi kepegawaian yang mendukung efisiensi dalam internal pemerintah. Kemudian pada pelayanan publik munculnya SAMSAT online dan *e-billing* dalam pelayanan perpajakan, aplikasi *Lapor!* dalam pelayanan pengaduan, *e-procurement* dalam proses pelelangan, *e-parkir*, dsb. Dampak pengembangan *e-government* di Indonesia dapat kita lihat dari data Indeks Kemudahan Bisnis yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dimana Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dengan naik 19 peringkat menjadi peringkat 72 pada tahun 2018. Beberapa indikator yang berkontribusi adalah pemakaian sistem elektronik perpajakan dan sistem elektronik terkait dokumen impor.

Dan pada beberapa tahun terakhir, pemanfaatan TIK berkembang lebih luas melalui konsep "Smart". Konsep yang mulai banyak dilirik oleh pemerintah daerah ini merupakan konsep pengelolaan suatu wilayah secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan memanfaatkan TIK sebagai *enabler*. Banyak pemerintah daerah yang mengklaim daerahnya sebagai *smart province*, *smart city*, maupun *smart regency*. Cakupan konsep pintar ini memang luas karena

meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, energi, transportasi, lingkungan, ekonomi, pemerintahan, dll. Namun konsep pintar ini juga bisa mendorong percepatan reformasi birokrasi jika unsur pemerintahannya berhasil bertransformasi menjadi *smart government*. Daerah yang memiliki *smart government* akan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan TIK dan inovasi.

Sementara itu untuk konteks pemanfaatan TIK di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 pernah menjadi provinsi peringkat 1 dalam penerapan *e-government* terbaik (Kemenkominfo). Sekalipun kemudian turun ke peringkat 2 di tahun 2016, namun sistem *e-government* Provinsi Jawa Barat dijadikan percontohan bagi 17 provinsi dalam pencegahan korupsi oleh KPK (www.jabar.antaranews.com). Selain itu provinsi Jawa Barat juga sedang memacu laju untuk dapat menjadi *smart province* dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan publik berbasis digital yang efektif dan efisien di segala bidang. Upaya ini dimulai dengan membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis serat optik sepanjang 3.000 kilometer yang terintegrasi dengan kabupaten/kota di Jawa Barat (www.tribunnews.com). Pendirian infrastruktur *Command Center* atau pusat kendali juga direalisasikan sebagai sarana untuk mengevaluasi, *monitoring*, dan menjalankan urusan wajib kewenangan provinsi (www.ayobandung.com).

Peluang dan Tantangan Penggunaan TIK dalam Akselerasi Reformasi Birokrasi

Revolusi industri 4.0 memberikan peluang yang besar untuk pemerintah memanfaatkan TIK dalam bertransformasi ke arah yang lebih baik. Ketersediaan TIK yang berlimpah dengan segala kecanggihannya sudah semestinya dimanfaatkan sebaik mungkin agar pemerintah memiliki daya saing global di era digital ini. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa beragam tantangan juga harus dihadapi dalam penggunaan TIK di lingkungan pemerintah. Isu keamanan data, kompetensi SDM, anggaran, dan budaya adalah contoh dari sekian banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu, beberapa hal berikut ini perlu dijawab bersama:

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam beradaptasi terhadap teknologi disruptif di era Revolusi Industri 4.0?
2. Bagaimana strategi optimalisasi pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi sekarang dan yang akan datang dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi?
3. Bagaimana strategi dalam menyiapkan kompetensi SDM Aparatur agar mampu menguasai perkembangan TIK di era revolusi industri 4.0?
4. Bagaimana strategi internalisasi budaya digital di instansi pemerintah agar program pemanfaatan TIK terjamin keberlanjutannya?

Berbagai rumusan strategi yang disusun hendaknya meliputi berbagai aspek. Jadi tidak hanya memikirkan bagaimana pembangunan infrastruktur dan penyediaan TIK saja, namun juga menyiapkan aspek lain seperti SDM, budaya kerja, anggaran, dll. Pemanfaatan TIK hendaknya dipandang dari perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Selanjutnya, momen berkembangnya era Revolusi Industri 4.0 ini dapat menjadi pendorong Provinsi Jawa Barat untuk lebih meningkatkan penggunaan IT dalam menunjang Reformasi Birokrasi serta menyusun strategi yang komprehensif dan terintegrasi agar menjadi provinsi yang siap untuk menghadapi RI 4.0.

D. Artikel 4: Inovasi dan Reformasi Birokrasi: Kunci Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

Ditulis oleh: **Rosita NA., Putri WAR., & Hendra NS.**

Revolusi Industri (RI) 4.0 menjadi titik awal lahirnya suatu era dimana *digital economy, artificial intelligence, big data, otomasi, robotica, komputasi* hingga *artificial intelligence* sebagai suatu keniscayaan. RI 4.0 telah mendorong hadirnya *disruptive technology* pada birokrasi pemerintah dan implikasinya adalah adanya transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, era RI 4.0 yang sudah berlangsung ini harus diantisipasi secara serius oleh setiap birokrasi pemerintah agar mampu menghadapi setiap peluang sekaligus tantangan dari perubahan tersebut. Salah satu kunci menghadapi era RI 4.0 tersebut adalah menerapkan inovasi dalam proses Reformasi Birokrasi (RB). Menurut Presiden Jokowi (2018), inovasi adalah kunci dalam merespon perubahan zaman, sehingga tidak ada pilihan lain jika kita ingin Indonesia maju, kita harus melakukan perubahan pola pikir, cara kerja, model organisasi, produktivitas, dan disiplin nasional (<https://ristekdikti.go.id/>). Selanjutnya, menurut Utomo (2017) sekalipun RB telah membawa perubahan terhadap pelayanan publik, namun RB saja tidak cukup ampuh untuk mencapai target-target besar yang telah ditetapkan, sehingga mau tidak mau, harus ada variabel lain yang harus didorong untuk dapat mengakselerasi RB yaitu inovasi.

Meneropong Praktek Inovasi di Indonesia dan Provinsi Jawa Barat

Praktek inovasi di Indonesia secara empiris sudah banyak dilakukan di berbagai sektor. Hal tersebut terbukti dengan naiknya peringkat Indonesia pada *Global Innovation Index* (GII) dari peringkat ke-87 pada tahun 2017 menjadi peringkat ke-85 pada tahun 2018. Pada laporan GII 2018, Indonesia tampil lebih baik dalam output inovasi (hasil yang diperoleh dari inovasi itu sendiri) daripada input inovasi (berbagai sumber daya yang diperuntukkan dalam proses menciptakan inovasi). Adapun kekuatan Indonesia terlihat dari indikator input inovasi yaitu kemajuan pasar, kemajuan bisnis, infrastruktur dan institusi dan dari indikator output inovasi yaitu kreativitas output inovasi dan output pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, kelemahan Indonesia relatif terkumpul pada indikator input inovasi yaitu: kelembagaan, kinerja peraturan daerah, dan pengembangan manusia dan penelitian dan dari indikator output inovasi yaitu output pengetahuan dan teknologi (penciptaan pengetahuan). Naiknya peringkat tersebut, menjadikan Indonesia menempati posisi ke-13 dari 30 Negara berpenghasilan menengah bawah dan posisi ke-14 dari 15 negara untuk kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Oceaniaposisi. Namun demikian, posisi tersebut masih dibawah Negara Malaysia, Thailand, Brunei Darusalam dan Filipina (<http://industri.bisnis.com>).

Di bidang pemerintahan, inovasi juga mulai banyak dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah telah menjamin setiap instansi pemerintah untuk melakukan inovasi. Sementara itu, praktek inovasi di daerah, terutama di Provinsi Jawa Barat juga sudah dilakukan. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari Data Sistem Informasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan bahwa inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat sudah dilakukan di sebagian besar instansi Perangkat Daerah (PD) mulai dari tahun 2014 (13 instansi), tahun 2015 (4 instansi), dan tahun 2017 (13 instansi). Selanjutnya dari data SINOVIK tersebut dapat diketahui bahwa praktek inovasi juga sudah dilakukan oleh beberapa Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat seperti: Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Kota Banjar dan Kabupaten Bogor (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2017). Selain itu, keberhasilan praktek inovasi di Provinsi Jawa Barat juga terbukti melalui penghargaan *Innovative Government Award* pada tahun 2017 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu dari 3 Provinsi dengan Predikat Pemda Inovatif (<https://news.detik.com/>). Pemda Inovatif adalah Pemda yang telah berhasil melakukan berbagai inovasi daerah baik inovasi dalam bentuk tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan daerah. Kemudian, pada tahun 2017, beberapa inovasi dari Pemda Kabupaten/Kota juga

berhasil masuk ke jajaran TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB seperti Pemda Kota Bandung (Inovasi e-SATRIA) dan Pemda Kabupaten Sumedang (Inovasi PANTASI MART).

Inovasi Daerah: Hambatan dan Strategi Pengembangannya

Praktek inovasi yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa inovasi semakin mudah dilakukan dan mulai dirasakan manfaatnya. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan dan permasalahan dalam implementasinya seperti yang dikemukakan oleh Mulgan dan Albury (Utomo, 2017) yaitu: (1) adanya keengganan dari individu atau organisasi untuk mengganti program lama yang mengalami kegagalan dengan program baru yang menjanjikan; (2) adanya anggapan bahwa inovasi hanya mungkin dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi strategis dalam organisasi; (3) seringkali inovasi gagal bukan dikarenakan tidak mendapatkan dukungan teknologi melainkan dikarenakan tidak didukung oleh kebijakan organisasi yang mendukung inovasi/perubahan; (4) organisasi tidak memberikan penghargaan atas lahirnya sebuah inovasi; (5) SDM organisasi tidak memiliki keterampilan dan kompetensi dalam mengelola inovasi; (6) inovasi yang dihasilkan hanya mengacu pada rencana jangka pendek tanpa memperhatikan keberlangsungan inovasi /*sustainability*; (7) inovasi seringkali berbenturan dengan aspek administratif sebuah layanan publik; dan (8) tidak adanya budaya berani menanggung resiko atas pilihan yang telah diambil. Untuk menguranginya, beberapa hal perlu dipersiapkan oleh Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat agar inovasi yang dilakukan mampu mendorong akselerasi RB di era RI 4.0 adalah:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemda Prov/Kota/Kabupaten dalam menghadapi berbagai hambatan dan masalah dalam implementasi inovasi daerah?
2. Bagaimana strategi pengembangan inovasi daerah di Provinsi Jawa Barat agar tidak sekedar bersifat *trouble shooting* tetapi juga memperhatikan aspek keterpaduan (integrasi) dan keberlanjutan (*sustainability*) antar sektor terkait?
3. Bagaimana strategi mentransformasi budaya inovasi daerah yang adaptif di birokrasi pemerintahan?

Apabila Pemda Prov/Kabupaten/Kota mampu menerapkan strategi pengembangan inovasi daerah yang tepat, maka kinerja penyelenggaraan Pemda akan semakin meningkat dan mampu menghadapi berbagai tantangan di Era RI 4.0.

E. Data Hasil Kuesioner

Terdapat dua jenis kuesioner yang disebarluaskan kepada responden. Kuesioner pertama diperuntukkan bagi ASN di Pemerintah Daerah yang menilai kesiapan Pemda tempatnya bekerja dalam melaksanakan RB di daerah. Lebih jauh lagi, dalam kuesioner, ditanyakan hambatan dan saran untuk memanfaatkan praktek collaborative governance (CG), inovasi (Ino), dan teknologi informasi (TI) untuk mempercepat serta meningkatkan kualitas pencapaian RB di daerah. Sedangkan kuesioner kedua diperuntukkan bagi masyarakat umum di mana tujuan pengumpulan datanya hampir sama dengan kuesioner pertama, tapi difokuskan untuk melihat kesiapan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Jenis pertanyaan yang digunakan dalam kedua kuesioner relatif sama, yakni pernyataan tertutup untuk menilai kesiapan Pemda dalam melaksanakan RB; dan pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan informasi mengenai hambatan dan saran untuk memanfaatkan praktek collaborative governance (CG), inovasi (Ino), dan teknologi informasi (TI) untuk mempercepat serta meningkatkan kualitas pencapaian RB. Pada jenis pernyataan tertutup, hasilnya dikategorikan menjadi lima tingkatan, yakni A berarti Sangat Baik; B berarti Baik; C berarti Sedang; D berarti Kurang Baik; dan E berarti Tidak Baik. Sedangkan untuk pertanyaan terbuka dituliskan secara deskriptif sesuai dengan konten tanggapan responden.

Secara umum, hasil dari **Kuesioner Pertama** menunjukkan bahwa seluruh responden menilai bahwa tingkat kesiapan Pemda mereka dalam menghadapi RB pada kategori Baik (B). Poin tertinggi dijatuhkan pada pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan selisih sangat tipis, poin berikutnya pada penerapan konsep *collaborative governance* dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan poin terendah ada pada aspek pemanfaatan TI dalam pemerintahan. Secara lebih rinci hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Skor Pernyataan Tertutup Kuesioner 1

Dimensi RB di Era RI 4.0	Nilai	Kategori
1. Inisiasi dan Pengelolaan Kolaborasi/Jejaring Kerja	3.89	Baik
2. Pemanfaatan hasil kolaborasi/Jejaring kerja	3.61	Baik
3. Pengembangan inovasi pelayanan publik	3.93	Baik
4. Pengembangan budaya inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	3.60	Baik
5. SDM penerapan TI yang memadai	3.43	Baik
6. Pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	3.77	Baik

Responden melihat beberapa permasalahan yang menghambat penerapan maksimal dari aspek CG, Ino, dan TI adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan SDM yang kurang memadai dan belum merata;
2. Kurangnya komitmen pimpinan;
3. Kebijakan yang kurang dinamis;
4. Keterbatasan sarana prasarana;
5. Lemahnya koordinasi, jejaring kerja/kolaborasi;
6. Budaya kerja yang kurang mendukung;
7. Rendahnya *reward* dan *punishment*; dan
8. Kurangnya dukungan anggaran;

Oleh karena itu, untuk mengatasinya disarankan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penambahan dan pelatihan SDM;
2. *Mapping* kompetensi *leadership* pimpinan;
3. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kebijakan;
4. Pengadaan sarana prasarana yang memadai;
5. Memperkuat koordinasi dan jejaring kerja/CG;
6. Merubah budaya kerja;
7. Pemberian penghargaan dan pameran inovasi;
8. Peningkatan anggaran untuk inovasi, sarpras; dan
9. Bangun media komunikasi yang efektif;

Sedangkan untuk Kuesioner Kedua, secara umum hasilnya sama dengan Kuesioner Pertama, Responden menilai tingkat kesiapan Pemda Prov Jawa Barat pada kategori Baik (B). Bedanya adalah nilai kesiapan tertinggi terletak pada aspek pemanfaatan TI. Disusul pada penerapan konsep CG. Terakhir adalah utilisasi inovasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara lebih rinci hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Skor Pernyataan Tertutup Kuesioner 2

Dimensi RB di Era RI 4.0	Nilai	Kategori
1. Inisiasi dan Pengelolaan Kolaborasi/Jejaring Kerja	3.90	Baik
2. Pemanfaatan hasil kolaborasi/Jejaring kerja	3.70	Baik
3. Pengembangan inovasi pelayanan publik	3.90	Baik
4. Pengembangan budaya inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	3.60	Baik
5. SDM penerapan TI yang memadai	3.90	Baik
6. Pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	4.00	Baik

Responden melihat beberapa permasalahan yang menghambat penerapan maksimal dari aspek CG, Ino, dan TI adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan SDM yang kurang memadai dalam penggunaan IT;
2. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat;
3. Kurangnya koordinasi; dan
4. Ego sektoral.

Oleh karena itu, untuk mengatasinya disarankan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelatihan SDM dalam pemanfaatan IT;
2. Sosialisasi, edukasi publik, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Memperkuat koordinasi dan jejaring kerja/CG; dan
4. Integrasi aplikasi antar OPD.

Penutup

Lokakarya "Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" telah dilaksanakan pada Hari Rabu, 31 Oktober 2018 di Gedung Serba Guna PKP2A I LAN. Semua informasi dan butir rekomendasi, semoga dapat berkontribusi dalam memajukan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten serta Kota yang ada di lingkup yang sama. Adapun Intisari pemikiran seperti yang disampaikan di bawah ini.

Dr. H. Iwa Karniwa, SE AK, MM, CA, PIA

Dengan positioning strategis Jawa Barat pada tataran Nasional, Provinsi Jawa Barat perlu melakukan upaya-upaya transformatif untuk mengantisipasi tantangan RI 4.0, dengan menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur, mendorong generasi milenial menggunakan internet untuk aktivitas produktif, dan menciptakan proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik.

Dr. Muhammad Taufik, DEA.

- Dalam rangka mewujudkan Visi Jabar Juara Lahir Batin, maka inovasi dan kolaborasi menjadi prasyarat (*prerequisites*) bagi penyelenggaraan pemerintahan Jawa Barat kedepan.
- Dengan mayoritas ASN Jawa Barat adalah guru dan fungsional umum, Pemprov Jabar memiliki PR besar untuk mengembangkan kompetensi ASNnya secara keseluruhan dengan melengkapi *skills* ASN sebagaimana yang dituntutkan oleh RI 4.0 yaitu *skills* terkait *human touch* seperti inovasi, kreatifitas, *complex problem solving*, dsb yang tidak dapat digantikan oleh Robot, *Artificial Intelligent*, dan *Internet of Things*.
- Dalam konteks Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa barat masih dihadapkan pada PR untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sementara Pemerintah Kabupaten Kota di lingkup Jawa Barat juga masih memiliki PR untuk mengembangkan pendekatan RB yang tidak berdasar formalitas dan dokumen. Untuk itu dalam rangka menyongsong RI 4.0, orientasi Reformasi Birokrasi harus didesign dari *transactional reform* menjadi *transformational reform* dengan mengedepankan *creative learning*, kolaborasi, *entrepreneurship*, inovasi dan *customer citizen driven*. Harapannya ke depan, bisnis proses di birokrasi menjadi efisien.
- Dalam rangka menyongsong RI 4.0, cara kerja organisasi sektor publik harus mulai berbasis pada *intensive knowledge* dan *high skills talent*.
- Pengembangan kompetensi dalam rangka menyongsong RI 4.0, Pemerintah Jawa Barat dapat mengembangkan *Corporate University* yaitu sebuah cara pembelajaran baru yang didesign dengan menurunkan RPJMD kedalam program-program pembelajaran dalam bentuk *cluster-cluster knowledge* yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh SKPD.
- Proses pembelajaran sebagian besar dilakukan ditempat kerja dengan *dynamic learning system* yang terbagi kedalam beberapa level: 1) level strategis untuk mengidentifikasi dan mengakusisi pengetahuan dan ketrampilan baru; 2) level organisasi/pekerjaan yang dimaksudkan untuk memenuhi *gap* kompetensi dan kinerja pegawai, dan 3) level operasional yang dimaksudkan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dan inovasi.

- Provinsi Jawa Barat dapat mengembangkan Laboratorium Inovasi Strategis Terpadu melalui Dialog Intensif antar elemen terkait.

Agung Suryamal

- Tantangan dunia usaha di Indonesia di Era 4.0 saat ini adalah terbukanya perdagangan bebas diantara negara-negara ASEAN yang tergabung dalam MEA dan ekspansi perdagangan Cina ke Indonesia.
- Permasalahan yang dihadapi para pengusaha adalah modal usaha yang susah dan penguasaan teknologi yang rendah.
- Peran Kadin dalam mendorong perekonomian Indonesia saat ini adalah:
 1. Mendorong kreativitas dan inovasi para pengusaha (UMKM)
 2. Mendorong para pengusaha (UMKM) melek digital melalui pelatihan-pelatihan
 3. Mendorong para pengusaha Jabar berorientasi ekspor
 4. Selalu berperan aktif dalam collaborative governance dengan pemerintah

Wiseto Agung

- Industry 4.0 intinya adalah kolaborasi pada manusia, dan big data yang bisa dikolaborasikan yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa
- 50% penduduk Indonesia menggunakan internet, social dunia, dan menggunakan mobile, serta pertumbuhan Indonesia pada posisi ketiga terbesar setelah china dan india menjadi peluang bagi pemodal asing melirik pasar Indonesia
- Dengan adanya RI 4.0 ini terdapat banyak pergeseran ke dunia digital, sudah banyak barang yang diperdagangkan bermuatan digital. Dengan digital ekonomi, barang-barang ekonomi dapat disalurkan ke selurah daerah.
- Peran TELKOM dalam membangun ekonomi digital untuk meningkatkan daya saing bangsa:
 1. Di Internal antara lain dengan: mendidik karyawan dengan digital dan memfasilitasi innovator internal untuk menghasilkan produk yang bermanfaat
 2. Untuk eksternal antara lain dengan: program indihome yaitu memberikan fasilitas dan pendanaan dan akses ke customer Telkom, Telkom bersinergi dengan BUMN (Telkom bekerja sama untuk mengelola rumah kreatif BUMN)

Lampiran

Bagian lampiran ini berisi beberapa informasi pendukung kegiatan lokakarya ini. Informasi tersebut yaitu: catatan tanya jawab dengan peserta, pertanyaan dari peserta yang disampaikan melalui laman sli.do, dan CV Narasumber.

A. Rekapitulasi Tanya Jawab Peserta

1. Bapak Alexander (Depok)

Bagaimana pemerintahan desa menghadapi RI. 4.0, apa kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan?

2. Bapak Natsir Alwi

Bagaimana menyerlaskan RI 4.0 dengan revolusi dalam tata kelola pemerintahan? Transformasi apa saja yang harus dilakukan?

3. Ibu Sedarmayanti (Universitas Bung Tomo, Surabaya)

Apa yang harus dilakukan berkaitan dengan RB utamanya dengan 8 area perubahan yang sudah cukup lama dilakukan? Kenyataan di lapangan ternyata masih banyak Kab/Kota masih belum sesuai pelayanan publiknya? Berkaitan dengan 10 top skil, yang harus diperhatikan. Apa yang harus dilakukan? 8 Area perubahan tersebut tidak sesuai lagi atau adakah hal lain yang harus dilakukan agar bisa langsung memperbaiki RB yang ada di Jabar?

JAWABAN:

1. PT. Telkom

Ada dua hal yang ditambahkan: gap pendidikan antara desa dan kota , era sekarang sudah tidak valid lagi karena siapapun semua bisa mengakses pendidikan dari manapun, konten pembelajaran di luar sana secara free, kuncinya adanya kemauan dan akses.

Efek digital dalam RB, saya yakin digital bisa membuat sesuatu dengan lebih baik contohnya: gojek, beberapa tahun lalu pesimis, karena foundernya memiliki visi yang kuat sekarang gojek menjadi perusahaan digital besar di Indonesia, Kuncinya adalah kemauan dan leader yang mempunyai visi digital yang baik sehingga ASN bisa bekerja lebih baik.

Dukungan PT Telkom ke Pemerintah Provinsi besar.

2. Ketua Kadin

Apa kendala yang dihadapi Kadin dalam kolaborasi dengan Pemda: antara Kadin dan Provinsi membuat program dalam peningkatan skill baik ASN maupun pengusaha. Program Garuda, wirausaha desa untuk mendorong kemampuan masyarakat desa untuk produktif usaha desa, seperti di Cililin. Pemilihan Kepala Daerah tidak perlu langsung, tetapi melalui DPRD. Era sekarang, efisiensi sangat penting. Networking sangat penting.

3. Kepala LAN

Tantangan RI. 4.0, perlu melakukan perubahan pendekatan, Reformasi Birokrasi Kontekstual sesuai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masing-masing instansi. Akselerasi proses RB terutama di LAN, perubahan kebijakan: pengembangan kompetensi ASN, proyek perubahan yang mendorong inovasi, pengembangan kompetensi ASN harus dengan pengembangan penguasaan teknologi dan karakter perilaku ber IT yang baik. Kesadaran pembangunan revolusi industri 4.0 harus didukung dengan kesadaran karakter bangsa. Negara yang maju adalah yang mempunyai kejayaan masa lalu. Negara yang maju adalah negara yang memiliki kekayaan alam. Yang menentukan maju mundurnya bangsa adalah karakter bangsa yang dimiliki, buka kejayaan masa

lalu maupun kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Mari membangun karakter bangsa didalam RB di Era RI 4.0.

RB Kontekstual menjadi pilihan masing-masing instansi dan sesuai kebutuhan.

B. Rekapitulasi Pertanyaan Melalui sli.do

1. Anonymous

Bagaimana LAN memanfaatkan 4.0 untuk membantu Pemda agar Diklat Pra Jabatan CPNS tidak memberatkan?

2. Anonymous

Bagaimana menngantisipasi perubahan disruptif teknologi yang cepat, kedalam dunia birokrasi yang cenderung lambat?

3. Dimas Satrio

Bagaimana dampak budaya birokrasi yang sekarang terhadap RI 4.0?

4. Eddy bandung

Kolaborasi apa yang ditawarkan Telkom kepada Pemda dalam mereformasi birokrasi dikaitkan dengan Revolusi Industri 4.0?

Bagaimana upaya yang dilakukan manajemen Telkom bertranformasi ke era revolusi industri 4.0?

5. Agus van Jogja

Apakah ada tindak lanjut dari lokakarya ini dlm bentuk pendampingan LAN kpd Pemda?

6. Anonymous

Kebijakan & program/kegiatan apa yg dilakukan Pemprov. Jabar bagi Pemda Kab/Kota utk mengakselerasi RB di era R.I. 4.0?

7. Elly BPSDM Jabar

Bagaimana peran Kepemimpinan yg Collaborative dlm menciptakan Trust Building dlm penyediaan pelayanan publik yg responsif sesuai kebutuhan masyarakat.

8. Anonymous

Apa kendala yg dihadapi KADIN dalam membangun kolaborasi dg Pemda dalam menghadapi RI 4.0?

9. Agus van Jogja

Bgmn kita bisa manfaatkan CPNS generasi milenial yg baru saja direkrut utk percepatan RB di Pemda?

10. Pracoyo

Dalam menghadapi RI 4.0 dibutuhkan kompetensi ASN yg merata baik di pusat maupun daerah, bagaimana upaya yg harus dilakukan dlm rangka collaborative governance?

C. Curriculum Vitae Narasumber

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si.

Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nama : Dr. Adi Suryanto, M.Si

Lahir : Kebumen, 08 Desember 1969

NIP : 19691208 199403 1 001

Jabatan : Kepala Lembaga Administrasi Negara (2015 – sekarang)

Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya – IV/d

Riwayat pendidikan :

- S1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, tahun 1993

- S2 Administrasi & Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, tahun 2000
- S3 Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tamat tahun 2008

Alamat kantor : Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

Alamat rumah : Perum Trias, Jl. Belimbing IX, Blok B.9/25 Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi

Email : adi.suryanto@lan.go.id ; aditgsar@gmail.com

Prestasi yang menonjol :

TINGKAT	URAIAN/BIDANG	TAHUN
Tingkat Instansi	Memimpin Tim Reformasi Birokrasi LAN	2013
	Memimpin Tim Pembaharuan Diklatpim Pola Baru	2013
	Memimpin Tim Pengembangan Reform Leader Academy (RLA)	2013
Tingkat Nasional	Inisiasi Pengukuran Kinerja Pemda (terbitnya PP 6 tahun 2008)	2007
	Tim Penilaian Pelayanan Publik	2008-2010
Tingkat Internasional	Terpilih sebagai Paper Terbaik dalam Konferensi Korean Association for Policy Studies (KAPS) 2013	2013 (KAPS Award)

Pelatihan terkait dengan manajemen dan leadership yang telah diikuti:

- *Effective Performance Management in a Learning Organisation* tahun 2016 di Middlesex University Inggris.
- *Strategic Human Capital Development Plan and Leadership* tahun 2016 di Moscow State University.
- *Talent Management for the Leaders* di University of Southern California, Los Angeles tahun 2017.
- *Training Program on Policy Implementation Strategy and Evaluation* pada tahun 2017 di Tokyo.
- *Strategic dialogue on reform of civil service leadership training & education system* di Perancis & Belanda, 2017.

Pengalaman sebagai presenter dalam berbagai seminar baik nasional maupun internasional:

Di forum internasional, berbagai seminar telah diikuti diantaranya Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), International Institute of Administrative Sciences (IIAS), International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), Korean Association for Policy Studies (KAPS), Network of Asia Pacific Schools and Institutes of Public Administration and Governance (NAPSIPAG). Pada tahun 2017 ditunjuk sebagai Vice President of 26th Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) General Assembly.

2. Dr. Muhammad Taufiq, DEA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara

Nama : Dr. Muhammad Taufiq, DEA.
Lahir : Magelang, 17 November 1967
NIP : 19671117 199401 1 001

Jabatan : Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (2015 – sekarang)
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya – IV/d

Alamat kantor : Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

Alamat rumah : Jalan Artzimar I No. 43 RT 002 RW 010, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat

Pendidikan Struktural yang telah diikuti:

- Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXVIII
- Diklat Kepemimpinan Tingkat I

Pelatihan Fungsional yang telah diikuti:

- Pelatihan Jurnalistik
- Pelatihan Design Publishing
- Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran
- Pelatihan Pengolahan Data Statistic
- Metodologi Penelitian
- Pengembangan Kurikulum
- Desain Instruktusional
- Metodologi Kuantitatif
- Training of Trainer Diklat Kepemimpinan bagi Perencana
- Metodologi Kualitatif
- Penulisan Studi Kasus
- Metodologi Update
- Metode Kuantitatif Penelitian Kebijakan
- Penelitian Kebijakan (*Policy Research*)

3. Dr. H. Iwa Karniwa, SE., Ak., MM., CA., PIA.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Nama : Dr. H. Iwa Karniwa, SE., Ak., MM., CA., PIA.
Lahir : Ciamis, 17 Februari 1963
NIP : 19630217 198503 1 009
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (2015 – sekarang)
Pangkat/Gol : Pembina Utama – IV/e

Riwayat pendidikan :

- S1 Ekonomi Akuntansi, UNPAD, tahun 1996
- S2 Manajemen Keuangan, STIE IPWI, tahun 1998
- S3 Manajemen Bisnis, UNPAD, tahun 2016

Alamat kantor : Jalan Diponegoro, Bandung

Alamat rumah : Komplek Fajar Raya Blok E 1, Cibabat, Cimahi Utara

Email : iwakarniwa@gmail.com

Pendidikan Struktural yang telah diikuti:

- Diklat Kepemimpinan Tingkat II tahun 2003
- Diklat Kepemimpinan Tingkat I tahun 2012

Pelatihan Fungsional/Teknis yang telah diikuti:

- Manajemen Audit tahun 1986
- Auditor Tk. Ahli tahun 1997
- Auditor Peran Ahli tahun 1999
- Penentuan Indikator
- Manajemen Pengawasan tahun 2006
- Komputer/Edp. Audit tahun 1992
- Audit Keuangan BUMN/BUMD tahun 1996
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2006

Pengalaman berorganisasi:

Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI), Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Barat, Universitas Pasundan, Universitas Winaya Mukti, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMII) Jawa Barat, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jawa Barat, Komunitas Safari Bandung, Persatuan Penggemar Merpati Balap Sprint Indonesia (PPMBSI), Yayasan El Jabar Indonesia, Paguron Pencak Silat Putra Kencana Muda (PKM) Indonesia, Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jabar Banten, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat, Forum Jagaseke Jawa Barat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Barat, Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Jawa Barat, Organda Cimahi, Forum OSIS Jawa Barat (FOJB).

4. Agung Suryamal Sutisno

Ketua KADIN Provinsi Jawa Barat

Nama	:	Agung Suryamal Sutisno
Lahir	:	Bandung, 06 April 1965
NIP	:	-
Jabatan	:	Ketua KADIN Provinsi Jawa Barat
Pangkat/Gol	:	-

Riwayat pendidikan :

- S1 Teknik Sipil, ITENAS
- S2 STHB (Sekolah Tinggi Hukum)

Alamat kantor :-

Alamat rumah : Jl. Sinom Raya No. 9 Bandung, Citra Grand Blok E18 No. 29 Cibubur Jakarta

4.0**Pengalaman Organisasi:**

1. Ketua Umum KADIN JABAR 2008 – 2018
2. Ketua HIPMI Jabar 2002-2005
3. Wakil Ketua PMI Jabar 2011 – 2016
4. Bendahara BAMUS SUNDA PUSAT 2013-2018
5. Anggota Dewan Pakar ICMI JABAR 2015-2019
6. Dewan Penasehat IFC (Indonesian Fashion Chamber) Chapter Bandung 2015-2019
7. Anggota Dewan Penasehat APINDO JABAR 2015-2020
8. Anggota Dewan Penasehat BPC Siliwangi Jawa Barat 2016-2021
9. Anggota Dewan Pakar Jabar Angkatan Muda Siliwangi 2015-2020
10. Anggota Dewan Pakar INTI (Indonesia Tionghoa) Jawa Barat 2015-2019

11. Ketua Dewan Penasehat Forum Pengusaha Pribumi Jawa Barat 2013-2018
 12. Ketua Dewan Pengawas JAPNAS (Jaringan Pengusaha Nasional) Jawa Barat 2017-2022
 13. Pelindung PERPIT (Persatuan Pengusaha Tionghoa) Jawa Barat 2015-2019
 14. Anggota Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah 2017-2022
 15. Ketua Umum ISMI Jabar (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia) 2018-2023
 16. Majelis Pertimbangan Pemuda Pancasila Jabar 2017-2023
 17. Dewan Penasehat KNPI Jabar (Komite Nasional Pemuda Indonesia) 2017-2023
5. Wiseto Prasetyo Agung
Vice President Media & Digital Business PT. TELKOM, Tbk.

Nama : Wiseto Prasetyo Agung
Lahir : -
NIP : -
Jabatan : Vice President Media & Digital Business PT. TELKOM, Tbk.
Pangkat/Gol : -

Riwayat pendidikan :

- BSc in Telecommunication, Institut Teknologi Bandung, Indonesia, tahun 1987
- MSc in Telematics, University of Surrey, UK, 1994
- PhD in Multimedia Communication, University of Surrey, UK, 2002

Alamat kantor : -

Alamat rumah : Jalan Japati Bandung

Email : -